

**PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR  
(KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI  
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN)**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**SUCI RAHMADANI ASHAR**  
**90300115036**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Suci Rahmadani Ashar  
**NIM** : 90300115036  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Sengkang, 11 Desember 1997  
**Jurusan** : Ilmu Ekonomi  
**Fakultas** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Alamat** : Jl. Abd. Muttalib dg. Narang II  
**Judul** : Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)  
Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor  
Wilayah DJBC Sulbagsel)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, September 2019

Penulis,

Suci Rahmadani Ashar  
90300115036



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI (Studi Pada Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel)”** yang disusun oleh Suci Rahmadani Ashar, NIM : 90300115036, Mahasiswa jurusan ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2019, bertepatan dengan 26 Dzulkaidah 1440 H. Menyatakan dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi.

Samata, 29 Juli 2019  
 26 Dzulkaidah 1440 H

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.

Penguji I : Dr. Hasbiullah, SE., M. Si.

Penguji II : Dr. Alim Syahriati, M.Si.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Kafrawi Mahmud, S.Pd., M.Si.

Diketahui Oleh :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
 NIP. 1985 1022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat, Rahmat, dan Hidayah-Nya yang karena dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya telah memberikan izin untuk mengetahui sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki-Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan Taslim kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi Khataman Nabiyyin Wa Khatamarrasul yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan seperti yang telah kita rasakan saat ini.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan)” Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis menyadari bahwa terselesainya proposal ini adalah atas izin Allah SWT. sebagai pemegang kendali dan penulis sadar bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada keluarga tercinta, yakni kedua orang tuaku ayahanda Ashar Hamnar dan ibunda tercinta Yuliana Agus, buat Etta dan Kakekku yang selalu ikut mendukung dan memberi dorongan serta semangat kepada penulis.

Penulis juga menghanturkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membimbing dengan penuh sabar dan yang mendampingi selama penulis menyelesaikan studi, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Ag Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambos Asse, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Siradjuddin, SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
4. Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi.
5. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Bapak Ahmad Kafrawi Mahmud, S.Pd., M.Si Selaku Pembimbing II Atas Semua Ilmu Yang Diberikan Kepada Penulis, Terimakasih Banyak Atas Arahkan, Motivasi, Semangat, Petunjuk Dan Telah Meluangkan Waktu Untuk Membimbing Penulis Selama Penyusunan Skripsi.
6. Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si Selaku Penguji I Dan Bapak Dr. Alim Syahriati, M.Si Selaku Penguji II Atas Semua Ilmu Yang Telah Diberikan Kepada Penulis. Terima kasih banyak karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk selalu memperbaiki ketidaksempurnaan pada penyusunan skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Yang Telah Banyak Memberikan Pengetahuan Baik Dalam Proses Perkuliahaan Maupun Diluar Dari Proses Perkuliahaan Sebagai Bekal Agar Bisa Menjalani Hidup Lebih Baik.
8. Seluruh Jajaran Staf Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dan Staf Jurusan Ilmu Ekonomi Yang Telah Membantu Penulis Untuk Menyelesaikan Administrasi Perkuliahaan.
9. Terimakasih Kepada Bapak Tommy Prasetyo Utomo Sebagai Kepala Seksi Perijinan Dan Fasilitas II, Bapak Yusri Harfidin Sebagai Pelaksana Pemeriksa Pada Seksi Perijinan Dan Fasilitas II, Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbagsel. Kepada Bapak Yasir Sebagai Staff Pada Kantor DJBC Sulsel, Kepada Bapak Randi Sebagai Staff Pada Kantor DJBC Bontang, Dan Kepada Bapak Makhfud Fibrianto, Sebagai Exim Coordinator Pada PT. Mars Symbioscience Indonesia, Yang Telah Memberikan Waktu Dan Kesempatan Untuk Menyampaikan Informasi Yang Peneliti Butuhkan.



10. Terimakasih Kepada Kakanda Dan Teman-Teman Yang Menemaniku Di Masa-Masa Sulit, Di Masa-Masa Semester Akhir Dalam Mengurus Penelitian Ini. Saya Sangat Beruntung Bisa Menjadi Bagian Dari Kalian. Ka.Lisa, Ka.Nanna, Kaka Yang Super Duper Baik Yang Selalu Mendukung Dan Menyempatkan Waktu Ditengah Kesibukannya Untuk Membantu Saya. Buat Uni, Dwy, Tika, Amel, Ari, Irfan Atas Doa, Motivasi Dan Yang Tak Pernah Bosan Mendengar Keluh Kesah Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
11. Terimakasih Kepada Sahabat Sejiwa Seraga Saya Dari Kecil Hingga Sekarang Ulfa Rulmadani Yang Tidak Pernah Berhenti Untuk *Mensupport* Dan Membantu Segala Sesuatu Yang Saya Lakukan, Yang Menemani Dikala Susah Dan Senang. Semoga Kita Menjadi Bagian Dari Orang-Orang Sukses Sahabat Dunia Akhirat,
12. Terimakasih Kepada Kakanda Irfam Yang Telah Memberikan Banyak Motivasi Dalam Menjalani Masa Kuliah
13. Terimakasih Kepada Teman-Teman Fakultas Ekonomi Angkt. 2015 Khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi, Yang Tidak Bisa Penulis Sebut Satu Persatu, Atas Dukungan Yang Diberikan.
14. Terimakasih Kepada Teman KKN. Angkt. 60 Desa Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penting sebagai bahan masukan penulis serta untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata semoga kita bisa tetap berada dalam pangkuan dan lindungan-Nya

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Samata , Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	9
B. Perdagangan Internasional .....	16
C. Ekspor Impor .....	24
D. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) .....	27
E. Kerangka Pemikiran.....	31
F. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III :METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. JenisPenelitiandanLokasi Penelitian.....	35
B. PendekatanPenelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Instrumen Penelitian .....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
G. Pengujian Keabsahan Data .....	40

<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Instansi .....	41
B. Hasil Penelitian .....	53
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 <b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
 DAFTAR PUSTAKA .....	 72
LAMPIRAN .....	76
RIWAYAT HIDUP .....	96
DAFTAR GAMBAR .....	





## ABSTRAK

**Nama : Suci Rahmadani Ashar**

**Nim : 90300115036**

**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**Judul : Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk meningkatkan ekspor dalam negeri (Studi pada kantor wilayah Direktorat jenderal bea cukai sulbagsel)**

---

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor dalam negeri bergantung pada peran masyarakat yang ikut andil untuk mendorong perekonomian melalui kegiatan ekspor dalam negeri. Sifat kebijakan yang diambil menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha yang berorientasi ekspor dalam menentukan kebijakan perusahaannya dibidang ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) di kanwil DJBC Sulbagsel dan peningkatan ekspor barang jadi di Sulawesi bagian selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian ini ialah proses pemanfaatan fasilitas KITE dan perbandingan ekspor perusahaan pengguna fasilitas sebelum dan setelah menggunakan fasilitas KITE. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan fasilitas KITE. Diantaranya adalah beberapa perusahaan yang sudah menggunakan fasilitas KITE sebelumnya harus dicabut karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan dalam PMK 176 & PMK 177.

Kata Kunci : Peningkatan Ekspor, Kebijakan Pemerintah, Fasilitas KITE, PMK 176 & PMK 177

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perdagangan internasional telah menjadi isu hangat di ranah politik domestik dan internasional akhir-akhir ini, munculnya organisasi perdagangan Internasional seperti World Trade Organization (WTO) mulai memicu kesadaran beberapa negara berkembang khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam hal pentingnya perdagangan internasional. Asosiasi of South East Asia Nation (ASEAN) telah mencanangkan organisasi serupa yaitu Asean Free Trade Area (AFTA) yang disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. AFTA ialah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif baginegara-negara ASEAN (Gilang, 2015).

Dalam rangka untuk menunjang, mendorong dan merangsang pengembangan industri, salah satu bentuk kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sesuai dengan Keputusan menteri keuangan no, 580/KMK.04/2003 tanggal 31 desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengawasannya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta badan pusat statistik (BPS) melakukan kajian mengenai dampak ekonomi dari fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Hasil dari studi menunjukkan hasil ekspor

mencapai 54,8 miliar USD atau 37,7% dari total ekspor nasional. Pada tahun 2017 Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan fasilitas KITE sebesar 2,40 artinya setiap nilai 1 dollar bahan baku yang diimpor dengan fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,40 dollar produk yang telah di ekspor (Keuangan. 2018).

Plt. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, mengungkapkan pada tahun 2016 fasilitas KITE telah melakukan investasi Rp. 168 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja atau 13,5 % dari seluruh tenaga kerja industri nasional. Penerimaan bidang perpajakan yang dikontribusikan sebesar Rp. 64,9 triliun dan pajak daerah sebesar Rp. 8,7 triliun. Total kontribusi yang diberikan oleh KITE adalah 3,59% dari PDB Indonesia (Rahayu, 2018).

Fasilitas ini di peruntukkan bagi pelaku usaha industri atau perusahaandengan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), bila melakukan importasi bahan baku, bahan penolong, dan barang modal berupa mesin untuk keperluan produksi barang jadi. Di samping itu pelaku usaha juga bisa memperoleh kemudahan dalam melakukan registrasi kepabeanan (Hapsari, 2018).

Pelayanan fasilitas KITE merupakan kegiatan yang *Complicated*. Kegiatan impor yang dilakukan hanyalah salah satu segmen dari beberapa kegiatan yang ada dalam fasilitas KITE. Banyak hal yang terlibat didalamnya, mulai dari mengimpor barang, melakukan proses produksi hingga mengekspor kembali barang hasil proses produksi tersebut. Sangatlah wajar bila fasilitas KITE sangat

membantu dunia usaha untuk berkembang sehingga tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian indonesia (Januar 2012).

DJBC memberikan sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) ke para pengusaha dan perusahaan yang kredibel sehingga dengan fasilitas itu (para pengusaha) bisa berkompetisi di dunia internasional dengan meningkatkan eksponya, sehingga peningkatan ekspor di sektor industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Perdagangan, 2016).

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah guna meningkatkan kegiatan ekspor diharapkan dapat melihat kondisi perekonomian dalam negeri dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada pengusaha yang ada di Indonesia, fokusnya ialah dalam lingkungan perindustrian yang melaksanakan kegiatan ekspor barangnya ke luar negeri, di sisi lain dampak kebijakan ekspor dan impor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi menyebabkan penurunan pendapatan distribusi lokal dan menambah parah stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan perekonomian dapat meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa terhadap perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju taraf kehidupan yang lebih sejahtera selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan suatu negara, karena berhasil tidaknya program-program pembangunan dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional (Wirathi, 2016).

**Tabel 1.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia  
Periode 2007-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Nasional (Milliar rupiah)</b>
2007	723 058
2008	781 354
2009	985 725
2010	949 656
2011	1 104 902
2012	1 311 387
2013	1 529 673
2014	1 667 141
2015	1 739 589
2016	1 822 546
2017	1 750 283

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018*

Pertumbuhan perekonomian yang begitu pesat menampilkan Indonesiasebagai bagian dari komunitas global. Hal ini tidak terlepas dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin maju dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya menuntut pembangunan yang erat kaitannya dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan luar negeri yang dapat mensejajarkan kedudukan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain melalui perdagangan internasional (A. Yusuf, 2018).

Pengaruh globalisasi ekonomi sangat mempengaruhi sistem perdagangan internasional. Satu bagian dari aspek perdagangan dunia saat ini berbentuk transfer intra-perusahaan yang dikenal dengan *intra-firm* dimana harga ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan multinasional yang dikenal dengan *Multinational Corporation (MNC)*, yang merupakan bagian dari strategi perusahaan global. Pola perdagangan yang

dihasilkan perdagangan konvensional berdasarkan konsep-konsep keuntungan komparatif. Terlebih lagi, devisa yang diperoleh dari jumlah perdagangan yang dihasilkan oleh perdagangan dengan MNC ini telah berkembang dengan pesat (Januar 2012).

Dalam pengertian *Economic of scale* diketahui bahwa semakin bertambah output produk yang dihasilkan, maka biaya-biaya per satuan pun dapat ditekan seminimal mungkin. Negara yang melakukan perdagangan dengan negara-negara lainnya untuk mencari manfaat ataupun keuntungan. Adapaun alasan negara tersebut adalah agar dapat mencapai suatu skala perekonomian (*economic of scale*). Sehingga proses produksi yang efisien dilakukan untuk mendapatkan profit maksimum. Keadaan tersebut dapat tercapai jika suatu negara tidak terfokus pada pasar domestik, namun juga harus berorientasi pada pasar luar negeri (Dona 2011).

Negara yang sedang berkembang perlu melakukan perdagangan dengan negara maju untuk mendapatkan capital dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja untuk mengimpor modal dan teknologi, terlebih dahulu harus memiliki dana atau valuta asing. Ekspor biasanya menghasilkan lebih dari setengah aliran valuta asing tahunan dinegara berkembang tersebut. Sisanya berasal dari bantuan luar negeri dan investasi swasta.

Sebagaimana dalam firman-Nya QS An-Najm/53:39-40(ar-Rusdi Departemen Agama RI, 2000).

﴿يُرَىٰ سَوْفَ سَعِيهِ ۖ وَأَنَّ سَعَىٰ مَا إِلَّا لِنَفْسٍ لِّيسَ وَأَنَّ﴾



### Terjemahannya

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,<sup>40</sup> dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu memperoleh dari apa-apa yang diusahakannya, di ibaratkan manusia dalam ayat tersebut seperti suatu negara apabila suatu negara ingin mendapatkan pendapatan yang lebih maka negara tersebut harus melakukan usaha yang lebih juga. Karena dari apa-apa yang diusahakan suatu negara tersebut untuk meningkatkan pendapatannya dilihat dari langkah atau upaya yang dilakukan oleh negara itu salah satu contoh misalnya dengan melakukan perdagangan internasional ekspor dan impor.

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan suatu saat nanti akan ditampakkan dari apa-apa yang diusahakannya misalnya dengan telah melakukan kegiatan ekspor impor, maka negara tersebut akan mendapatkan balasan berupa keuntungan dari segi materi.

Ekspor memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembangunan bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus memperhatikan sektor ekspor dalam melaksanakan pembangunan. Semua perusahaan di Indonesia dalam era globalisasi selayaknya berusaha untuk memproduksi barang berkualitas tinggi dengan biaya rendah dalam rangka meningkatkan daya saing baik dipasar domestik maupun pasar global.

Banyaknya kendala yang dihadapi oleh beberapa perusahaan di Indonesia, salah satu faktor disinyalir justru merupakan penghambat bagi perkembangan perusahaan dalam negeri adalah regulasi pemerintah yang dirasa bukan hanya menghambat masuknya investasi, namun juga menghambat ekspor. Tingginya biaya logistik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 25% terhadap total PDB juga menjadi salah satu permasalahan.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fungsi fokus penelitian adalah untuk memberikan batasan dan cakupan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam kesalahpahaman akibat perbedaan pemahaman antara pembaca dan penulis, dan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini.

Menurut Spradley bahwa fokus penelitian adalah *A focused to a single cultural domain or a few domains*, dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah implementasi pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk meningkatkan ekspor dalam negeri. Penelitian ini berorientasi pada sasaran kinerja ekspor-impor perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini (Jannah, 2017).

### **C. Rumusan Masalah**

Fasilitas KITE sudah sejak lama dikeluarkan, yaitu sejak tahun 2011. Ditandai pada saat dikeluarkannya peraturan tentang KITE yaitu KITE

pengembalan dengan peraturan kemenkeu PMK No. 253/PMK.04/2011 sedangkan KITE pembebasan PMK No. 254/PMK.04/2011 (Indonesia, 2016)

Masih banyaknya perusahaan yang belum mengetahui keberadaan fasilitas ini, sehingga yang tadinya ingin menjadikan fasilitas yang memberikan nilai lebih pada perusahaan tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian mengenai kebijakan KITE ini & dibutuhkan tindak lanjut dari pemerintah apakah intensif tersebut benar tepat sasaran atau tidak. Melihat ilustrasi tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan pokok yang akan dianalisis, yaitu: Bagaimana pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk meningkatkan ekspor dalam negeri ?

#### ***D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Bagaimana pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk meningkatkan ekspor dalam negeri.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

##### **1. Manfaat ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, khususnya dalam ekonomi internasional.

##### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk masalah Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### ***A. Pertumbuhan Ekonomi***

##### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Lestari, 2010).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet, adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukannya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produksi nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh apabila terjadi penambahan output rill (Raselawati, 2003 :34).

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

### a. Teori Herbert Hoover

Teori pertumbuhan berbasis ekspor atau model basis ekonomi tertanam dalam gagasan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran uang masuk agar tumbuh dan satu-satunya cara yang efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah menambah ekspor (Hoover, 1984).

### b. Teori Eli Hecksher dan Bertil Ohlin (Teori H-O)

Teori yang dinyatakan oleh Hecksher Ohlin ini dikenal dengan *the proportional factor theory*, yang menyatakan tentang perbedaan antara *opportunity cost* masing – masing negara bisa saja terjadi adanya perbedaan faktor produksi oleh masing-masing negara. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara dengan faktor produksi yang berlebih akan melakukan spesialisasi dan mengekspor sebagian hasil produksinya.

Teori ini dikenal dengan bentuk kurva *isocost* dan *isoquant*. Dimana *isocost* merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi antara 2 total biaya produksi yang sama, sedangkan *isoquant* adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama (Sy, 2007).

### c. Teori Keunggulan Komparatif (*Theory Of Comparative Advantage*)

Teori pertama mengenai ekspor yang dikemukakan ahli ialah teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam teori ini, ia menyatakan bahwa perdagangan internasional atau ekspor dapat terjadi apabila terdapat perbedaan keunggulan komparatif dari setiap negara. Keunggulan komparatif ini dapat dicapai apabila sebuah negara mampu memproduksi

sejumlah barang dengan volume besar namun dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain.

d. Teori Keunggulan Kompetitif

Teori ini dikembangkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1990 dalam sebuah bukunya yang berjudul “*The Competitive Advantage Of Nation*”. Ia berpendapat bahwa terdapat empat hal yang menyebabkan perusahaan dapat saling berkompetisi sehingga memunculkan adanya keunggulan kompetisi (Listyati, 2012).

Empat hal yang menyebabkan sebuah Negara dapat saling berkompetisi adalah:

**1. Kondisi Faktor Produksi (*Factor Conditions*)**

Kondisi ini yakni posisi dimana suatu negara dalam faktor produksi (tenaga kerja terampil, infrastruktur dan teknologi) yang dibutuhkan untuk bersaing dengan industri tertentu. Dalam hal ini untuk dapat memenangkan kompetisi tentu faktor produksi yang ada harus dimaksimalkan sedemikian rupa. Karena jika terdapat nilai minus pada salah satu faktor saja maka tidak akan mungkin anda dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global.

Seperti yang kita tahu bahwa, untuk dapat masuk ke pasar global tentu saja anda harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain. Mengingat standar kompetisi semakin tinggi, maka tentu untuk dapat memenangkannya kita harus mampu memaksimalkan faktor produksi yang ada. Jangan sampai terdapat kekeliruan dan bahkan kesalahan yang akan berakibat pada kalahnya kita dalam kompetisi merebut pasar internasional.



## **2. Kondisi Permintaan (*Demand Conditions*)**

Kondisi ini merupakan kondisi dimana terdapat sifat permintaan domestik terhadap barang dan jasa pada industri tertentu. Artinya bahwa, sebuah produk atau jasa tidak selalu memiliki tingkat permintaan yang tinggi dipasaran. Dalam hal ini sebelum mampu melakukan ekspor tentu kita harus mempertimbangkan kondisi pasar domestik. Dimana jika pemenuhan produk tersebut telah dikatakan cukup bagi pasar domestic maka tentu produk atau jasa tersebut dapat diekspor keluar.

Dalam hal ini, terkadang barang atau jasa yang di produksi tidak cukup diminati oleh pasar domestik. Namun lain halnya ketika produk dan jasa tersebut dijual ke pasar global. Nyatanya produk tersebut amat diminati. Tentunya dalam hal ini kemampuan dalam membaca kondisi permintaan pasar haruslah relevan dan sesuai dengan kenyataan.

## **3. Industri Terkait dan Industri Pendukung (*Related and Supporting Industries*)**

Keberadaan dan ketiadaan industri pemasok dan industri terkait yang kompetitif secara internasional di negara tersebut juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam ekspor. Keberadaan industri pemasok dan terkait akan sangat mendukung, Apalagi jika kedua industri tersebut mampu berkompetisi dalam pasar global. Tentunya peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dalam memperoleh pasar yang semakin luas dan besar dalam pasar internasional simak juga.

#### 4. Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan

Merupakan kondisi dalam negeri yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisasi, dan dikelola serta sifat persaingan domestik. Dalam hal ini, peranan semua struktur perusahaan dan pemerintah sangat terkait. Dalam upaya menciptakan perusahaan yang mampu bersaing secara domestik. Sehingga akan mampu memenangkan persaingan dan tampil pada pasar global(Jumiana, 2017).

Proses pembangunan ekonomi tentu membawa perubahan atas struktur ekonomi suatu negara.perbedaan struktur dan sistem ekonomi tentu menjadi hal yang prihatin disetiap negara, karena masing-masingnegara tentu memiliki pola dan bentuk struktur perekonomian masing-masing.Perbedaan tersebut diakibatkan karena beberapa hal, yaitu:

##### a. Kondisi awal perekonomian dalam negeri

Jika suatu negara dimulai pada negara agraris atau pertanian kemudian menuju pada sektor industri, maka secara berangsur-angsur dimulai dari tahap industri ringan, kemudian ke industri sedang, lalu ke industri puncak/berat.namun, jika suatu negara pada suatu awal perekonomian sudah memiliki industrialisasi sebagai langkah utama, maka negara tersebut akan mengalami industrialisasi yang lebih pesat lagi.

##### b. Tingginya Pasar Dalam Negeri

Tinggi atau besarnya pasar dalam negeri dinilai dengan menilai kombinasi dua faktor antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil perkapita

c. Ciri-Ciri Industrialisasi

Yang menjadi ciri industrialisasi dalam negeri seperti jenis industrialisasi, pola pembangunan suatu negara dan insentif yang diberikan

d. Sumber Daya Alam

Adanya kecenderungan jika suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang lebih banyak, cenderung akan lambat dalam proses industrialisasi dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang sedikit.

e. Kebijakan pemerintah

Pola industrialisasi di suatu negara yang menerapkan substitusi impor dengan perdagangan luar negeri yang protektif tentubeda dengan negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor (Lestari, 2010).

Ada dua pilihan strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam melakukan perdagangan luar negeri yaitu:

1. Substitusi Impor Strategi SI

Strategi ini menekankan kepada industri yang berorientasi di pasar domestik dengan laju perekonomian yang tinggi dapat dicapai dengan memproduksi barang – barang pengganti impor yang sejenis. Beberapa pertimbangan sebelum memilih kebijakan ini, yakni :

- 1) SDA (Sumber daya alam) / dalam hal ini bahan baku dan faktor produksi (*Labour*) tersedia sehingga biaya produksi menjadi rendah.
- 2) Permintaan dalam negeri yang menunjang
- 3) Mendorong sektor industri dalam negeri

4) Mendorong terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas

5) Dapat mengurangi ketergantungan impor.

a. Strategi Promosi Ekspor (PE)

Strategi ini lebih menjelaskan pengembangan industri yang berorientasi kepasar *interntional* , dilandasi pemikiran bahwa laju perekonomian yang tinggi hanya dapat direalisasikan jika adanya produk yang dibuat di dalam negeri dijual kepasar ekspor (Miranti, 2015).

Syarat yang dapat digunakan dalam memilih strategi ekspor adalah sebagai berikut:

1. Pasar harus mendeteksi harga dengan benar dan membandingkan dengan harga barang dinegara lain.,
2. Tingkat pendeteksi impor wajib rendah
3. Nilai kurs rupiah harus realistik, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan
4. Harus adanya insentif dalam meningkatkan ekspor(Lestari, 2010).

Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang memiliki sistem perekonomian yang bersifat terbuka seperti di Indonesia, karena ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya(Miranti, 2015).

## ***B. Perdagangan Internasional***

### **1. Pengertian Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.

Perdagangan antara negara atau perdagangan internasional sudah ada sejak zaman dahulu., namun dengan ruang lingkup yang terbatas. Perdagangan terjadi karena tidak mempunyai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (tidak dapat diproduksi di dalam negeri) sehingga mendatangkan barang dari negara lain dan muncullah transaksi perdagangan internasional. Pada mulanya transaksi tersebut dilakukan dengan cara (barter) pertukaran langsung barang dengan barang lain yang dibutuhkan kedua belah pihak, yang masing-masing tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Rinaldi, 2017).

Perdagangan terjadi karena masing-masing negara memiliki perbedaan, misal dalam hal sumber daya alam (SDA), *labour*, kondisi iklim, *economic sturctur*, kondisi geografis dan atas kebutuhan saling menguntungkan satu sama lain. maka terjadilah pertukaran yang kemudian secara umum dapat dikatakan sebagai *internatioanl market*. Sebagaimana dalam firman-Nya QS Fathir/35:29 (ar-Rusdi Departemen Agama RI, 2000).

جُوبَ وَعَلَانِيَةً سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كِتَابَ تِلْوَ الَّذِينَ إِنَّ

تَبُورَلْنَجِرَّةَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika suatu kelompok atau suatu negara melakukan tindakan perniagaan atau perdagangan berdasarkan sistem atau aturan – aturan yang telah di tetapkan dan sesuai dengan syariat atau aturan-aturan yang berlaku, maka negara tersebut dapat melakukan suatu tindakan perniagaan yang tidak merugi. Dengan demikian, dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam sistem dengan tidak melanggar aturan–aturannya maka akan memperoleh keuntungan diatasnya.

Adapaun faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- 1) *natural resources / SDA*
- 2) *capital resources*
- 3) *human resources*
- 4) *Technology* . (Suharjon, Marwanti, & Irianto, 2017)

Berikut keuntungan yang dirasakan ketika melakukan perdagangan internasional, yaitu:



- a. Dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki suatu negara, terutama bahan-bahan mentah
- b. Dapat menciptakan pembagian kerja dengan menetapkan skala ekonomi yang lebih besar.
- c. menggunakan sebagai wahana transmisi gagasan baru
- d. dapat memancing aliran modal
- e. dapat memacu negara untuk menciptakan produk-produk yang baru.
- f. menjadi instrumen efektif yang dapat mencegah terjadinya monopoli karena adanya tuntutan kompetensi yang tinggi (Paramarta et al., 2016).

## **2. Teori Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli**

- a. Teori Keunggulan Komparatif / Comparative Advantage (David Ricardo)

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Dalam teori ini lebih melihat kepada keuntungan dan kerugian perdagangan internasional dengan perbandingan relatif. Sampai dengan saat ini keunggulan komparatif merupakan dasar dalam melaksanakan perdagangan internasional. Teori komparatif milik David Ricardo juga dikenal sebagai teori modern perdagangan internasional.

David Ricardo berpendapat bahwa meskipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain dalam memproduksi barang tertentu, perdagangan internasional antar negara yang saling menguntungkan masih dapat terjadi. Dengan catatan bahwa negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki biaya relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Dasar pemikiran teori Ricardo ini pada dasarnya tidak berbeda dengan teori

absolut yang dikemukakan oleh Smith. Perbedaannya adalah terletak pada cara pengukuran terhadap keunggulan suatu negara, yakni ketika dilihat dari sisi komparatif biayanya dan bukan pada perbedaan absolutnya. Perbedaan utama dari kedua teori di atas adalah pada biaya mutlak dan relatif dalam memproduksi sebuah produk.

b. Teori Permintaan Timbal Balik / Reciprocal Demand (John Stuart Mill)

Teori ini dikemukakan oleh JS Mill, sebenarnya munculnya teori ini adalah untuk melanjutkan teori dari teori komparatif Ricardo dimana mencari titik keseimbangan antara pertukaran barang antar dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD).

Teori ini lebih menekankan kepada keseimbangan antara permintaan dan penawarannya, sebab permintaan dan penawaran merupakan penentu dalam menentukan jumlah barang yang akan diekspor dan diimpor. Pada dasarnya teori ini tidak jauh berbeda dengan teori komparatif yang dikemukakan oleh Ricardo perbedaannya adalah penentuan Dasar Tukar Internasional (DTI). Menurut Ricardo perdagangan internasional akan mendapatkan keuntungan jika DTI 1:1. Sedangkan menurut Mill keuntungan dapat diperoleh tanpa harus DTI 1:1, asalkan perdagangan internasional dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan memberikan keuntungan yang sama. J.S Mills menyimpulkan bahwa perdagangan internasional dapat bermanfaat bagi kedua belah negara jika terdapat perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi antar dua negara tersebut (Safitriani & Safitriani, 2014).

Ilmu Ekonomi makro, dalam perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya pertukaran barang antar dua negara melalui perdagangan yang saling menguntungkan kegiatan ekspor-impor, sehingga dapat dirumuskan sebagai:

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

Dimana:

Y: Pendapatan nasional

C: Konsumsi

I: Investasi

G: Pengeluaran pemerintah

X: Ekspor

M: Impor

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut: (Hamdy.2001).

#### 1. *Barrier Tariff*

Kebijakan Tarif Barrier dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:

##### a. *Ad Valorem Tariff* (Bea harga)

Pungutan bea masuk atas barang/bahan impor yang dilihat dari persentasi tarif x harga CIF barang tersebut. Misalnya tarif BM = 5%  
(BM= 5% x CIF x Kurs/Rp)

##### b. *(pesific Tariff* (Bea spesifik)

Pungutan bea masuk yang didasarkan atas ukuran satuan tertentu .

Misalnya tarif BM untuk semen Rp 3.000,00 per ton.

##### c. *Compound Tariff*(bea campuran)

Pungutan bea masuk yang merupakan kombinasi antara sistem 1 dan sistem 2

## 2. *Nontarif Barrier*

Kebijakan ini merupakan kebijakan perdagangan selain bea masuk yang mampu menimbulkan distorsi, sehingga dapat mengurangi potensi atau manfaat perdagangan internasional, yang secara garisbesar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1) *Spesific Limitation* (Pembatasan Spesifik)

Misalnya:

- a. Larangan mengimpor secara mutlak
- b. *quota system* (pembatasan impor)
- c. Peraturan kesehatan
- d. Peraturan keamanan dan pertahanan negara

### 2) *Customs Administration Rules* (Peraturan Bea Cukai)

Misalnya:

- a. Tata cara laksana impor tertentu
- b. Penetapan *price* atau harga pabean
- c. Penetapan kurs valas dan pengawasan devisa

### 3) *Government Participation* (Partisipasi pemerintah)

Misalnya:

- a. Kebijakan pemerintah
- b. Intensif ekspor dan subsidi

### 4) *Import Charges*

Misalnya:

- a. *Deposit impor*

Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Dewasa ini dapat dikatakan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang mampu memisahkan dirinya dengan negara lain terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Suatu negara dapat saja memenuhi salah satu kebutuhannya, namun di lain pihak ada kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi dari dalam Negeri karena alasan-alasan tertentu seperti keterbatasan dalam sumber daya alam, kekurangan modal, skill yang belum memadai dan lain-lain (Sy, 2007).

Kebutuhan demikian ini biasanya diperoleh dari negara lain melalui kegiatan perdagangan. Jadi telah terbentuk saling ketergantungan antara negara-negara yang ada di dunia ini. Dengan adanya saling ketergantungan dan semakin terbukanya perekonomian dunia, maka kegiatan perdagangan internasional menjadikan penting peranannya. Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari analisa ekonomi pembangunan, memegang peranan penting dalam usaha peningkatan pendapatan perkapita. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua negara telah melaksanakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional

yang bebas, memegang peranan penting dalam proses perkembangan suatu bangsa seperti yang dikemukakan Todaro dalam Purwiyanta:

*“International free trade has often been referred to as the ‘engine of growth’ that propelled the development of today’s economically advanced nation during nineteenth and early twentieth century. Rapidly expanding export market provided an additional stimulus to growing local demands that led to establishment of large-scale manufacturing industries. Together with a relatively stable political structure and flexible social institutions, these increased export earnings enabled the developing country in the nineteenth century to borrow funds in the international capital market at very low interest rate. This capital accumulation in turn stimulated further production, made possible increased imports, and led to more diversified industrial structure.”*

“(Perdagangan internasional yang bebas sering disebut sebagai ‘mesin pertumbuhan’ yang mendorong pembangunan bangsa ekonomi maju hari ini selama abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Pasar ekspor berkembang pesat disediakan dan stimulus tambahan untuk tuntutan lokal tumbuh yang menyebabkan pembentukan skala besar industri manufaktur. Bersama dengan struktur politik yang relatif stabil dan lembaga sosial yang fleksibel, ini pendapatan ekspor meningkat memungkinkan negara berkembang pada abad kesembilan belas untuk meminjam dana di pasar modal internasional dengan suku bunga sangat rendah. Akumulasi modal pada gilirannya merangsang produksi lebih lanjut, membuat impor meningkat, dan menyebabkan struktur industri yang lebih terdiversifikasi)” (Yolamalinda, 2016).



### ***C. Ekspor Impor***

#### **1. Pengertian ekspor**

Definisi ekspor adalah pengiriman barang dagangan keluar negeri melalui pelabuhan di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional (Purwaning, 2018).

Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Priadi, 2000).

a. Kegiatan ekspor terbagi menjadi 2, yaitu:

##### **1. Ekspor langsung**

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

## 2. Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor ( export management companies ) dan perusahaan pengekspor ( export trading companies ). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di Negara lain kurang. Umumnya, industri jasa menggunakan ekspor langsung sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya (Miranti, 2015).

### b. Tahap-tahap Ekspor

Perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan, berikut ini langkah persiapannya:

- 1) Identifikasi pasar yang potensial.
- 2) Penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan, SWOT analisis.
- 3) Melakukan Pertemuan, dengan eksportir, agen, dll.
- 4) Alokasi sumber daya. (Purwaning Astuti & Juniwati Ayuningtyas, 2018)

## 2. Pengertian Impor

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor pada umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar membutuhkan campur tangan

dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.

Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kegiatan industri dan lain-lain. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional (Almutmainnah, 2016).

Kegiatan impor merupakan kegiatan konsumsi masyarakat terhadap barang dari luar negeri. Seperti halnya konsumsi, impor juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendapatan nasional. Impor suatu negara merupakan faktor dari pendapatan nasional dan cenderung berkorelasi positif. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri sehingga impornya semakin besar (Benny, 2013).

Beberapa faktor yang mendorong dilakukannya impor:

- 1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang optimal dalam kegiatan produksi dalam negeri.
- 2) Adanya barang jasa yang belum atau tidak dapat diproduksi didalam negeri

- 3) Adanya jumlah atau kuantitas barang didalam negeri yang belum mencukupi.

Selain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya impor barang dan jasa, impor juga dapat dibedakan jenisnya yaitu : impor migas dan non migas, dan impor barang konsumsi. Berdasarkan teori tersebut maka jika dilihat dalam konsep perdagangan internasional, konsumsi yang dimaksud adalah konsumsi terhadap barang impor. Jadi kegiatan mengimpor dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau jika dilihat dalam skala nasional maka dipengaruhi oleh pendapatan nasional (Dasilveira, 2002).

Impor bahanbaku berpengaruh positif terhadapkenaikan penawaran ekspor pertanianmaupun industri. Untuk perusahaan yangbergerak pada industri ekspor manufakturyang bahan bakunya berasal dari impor, bahan impor tersebut dapatmeningkatkan nilai mutu produksi ekspor dalam negeri di pasarinternasional dan membuatnya layakbersaing di pasar internasional. Ketika memproduksi bahan baku sendirimaupun membeli bahan baku dari dalam negeri memiliki biaya lebih mahal dibandingkan mengimpor, maka akan lebih menguntungkan jika melakukan impor. Harga bahan baku yang lebihmurah akan menyebabkan biayaproduksi barang lebih murah sehinggaharga barang ekspor akan menjadi lebihmurah. Harga barang yang lebih murahdapat mendorong peningkatanpermintaan pasar internasional.

#### ***D. Kemudahan Impor Tujuan Eskpor (KITE)***

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau yang kemudian disebut sebagai KITE adalah merupakan kebijakan pemberian pembebasan atau

pengembalian Bea Masuk (BM) atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor suatu barang atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor. Pemberian fasilitas KITE pada perusahaan tertentu terdiri atas dua jenis, yakni fasilitas KITE pembebasan dan fasilitas KITE pengembalian. Fasilitas pembebasan merupakan fasilitas dengan pemberian bea masuk atau Cukai atas impor barang untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Sedangkan fasilitas pengembalian adalah, fasilitas dengan mengembalikan bea masuk atau Cukai yang telah atau terlanjur dibayar atas impor barang kemudian diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan Berikat (Perdagangan, 2016).

Keputusan (Kemenkeu ) Menteri Keuangan Nomor:580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 adalah dasar pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) lalu kemudian dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: Kep-205/BC/2003 tanggal 31-12-2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengawasannya (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Fasilitas Kemudahan Impor (KITE) terbagi dalam 2 jenis fasilitas

- a. Fasilitas Pembebasan merupakan pemberian pembebasan atas suatu barang yang diimpor untuk diolah atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke kawasan berikat.

- b. Fasilitas pengembalian pengembalian bea masuk tau cukai yang terlanjur atau telah dibayar atas barang impor atau bahan diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan berikat sdangkan yang dimaksud dengn kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan asal dari dalam daerah pabean Indonesia, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Fasilitas KITE ini juga mendorong :

- 1) Mendorong kegiatan ekspor sehingga akan meningkatkan aliran devisa yang masuk kedalam negeri.
- 2) Mampu meningkatkan ekspor non migas denganmelakukan penyederhanaan tatacara pemberian fasilitas.
- 3) Menggunakan produksi barang hasil olahan dari perusahaan yang mendapat fasilitas sebagai sebagai penunjang dalam peningkatan perekonomian negara.

## 1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kebapeanan;

- b. Undang-Undang No, 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kebapeanan;

## **2. Peraturan Pelaksana**

- a. Keputusan (Kemenkeu) Menteri Keuangan No: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
- b. Peraturan Menteri Keuangan No: 36/PMK.04/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No: 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: KEP- 205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: 14/BC/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No: P-25/BC/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor(Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) adalah wujud nyata kebijakan paket ekonomi tahap pertama untuk mendukung UMKM meningkatkan daya saing di dunia internasional. Memberikan kemudahan untuk pelaku industri kecil dan menengah di Tanah Air terus diusahakan pemerintah.

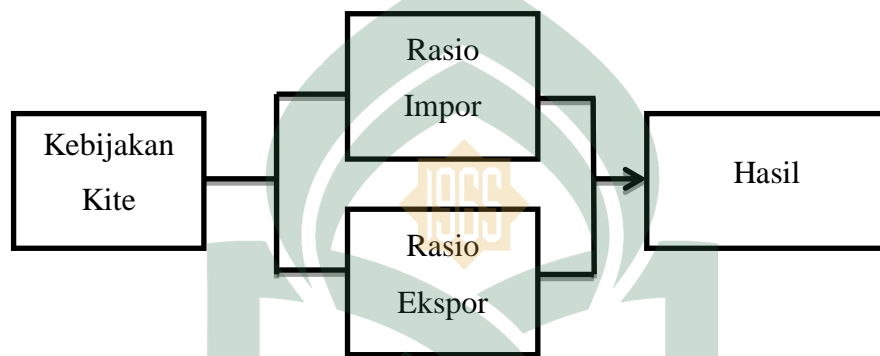
Fasilitas ini merupakan Fasilitas yang dimana membantu untuk peningkatan jumlah ekspor melalui pemberdayaan UMKM. Fasilitas ini memberikan banyak keuntungan salah satunya biaya yang tadinya harus dialokasikan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk menambah jumlah produksi, meningkatkan kualitas produksi, dan menurunkan harga barang sehingga produk-produk IKM agar dapat semakin bersaing di pasar internasional (Sy, 2007).

#### ***E. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang keterkaitan antar variabel peneliti yang akan dikaji dan yang akan dibangun oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau tujuan penelitian berdasarkan hasil tinjauan pustaka. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Dari sekian banyak sumber-sumber yang menjadi penerimaan sumber penerimaan negara, maka kegiatan perdagangan internasional termasuk yang paling penting dan dominan dalam membentuk jalannya pembangunan ekonomi di Indonesia.



Dengan anggapan bahwa kegiatan perdagangan internasional itu berfungsi sebagai *engine of growth*, yang didasarkan pada sumbangan dan peranannya dalam mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, terutama sumbangannya dalam mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, memperluas pasar produksi dalam negeri dan mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi.



Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwasanya, beberapa variable tersebut yaitu Kebijakan KITE, Rasio Impor dan Rasio Ekspor mempengaruhi Peningkatan nilai ekspor. Kebijakan kite merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui kegiatan perdagangan internasional. Volume impor dan ekspor juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya volume ekspor maka meningkat pula pendapatan nasional yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### F. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Alfi Nabila Agus Sriyanto	Pengaruh Fasilitas KITE terhadap nilai ekspor	Metode kuantitatif asosiatif, teknik analisis data regresi berganda	Membuktikan bahwa fasilitas KITE dan nilai kurs memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ekspor KITE, sedangkan nilai impor memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor KITE, sementara kebijakan KITE yang dikeluarkan pada tahun 2013 berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap nilai ekspor KITE.
2	Gilang Gumilar Imam Suyadi Rosalita Rachma	Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I Sidoarjo)	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisa-analisa berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya.	Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE diantaranya adalah : mahal nya pengadaan sistem aplikasi IT <i>Inventory</i> serta sumber daya manusia yang belum mampu menggunakan aplikasi tersebut
3	Januar Dona (2012)	Analisis Dampak pemberian fasilitas kite terhadap analisa kinerja keuangan perusahaan x,y,z	Metode kuantitatif dengan menggunakan analisis statistic non parametrik atau menggunakan uji <i>Wilcoxon Match Pairs Test</i> .	Pengembalian bea masuk yang cukup besar dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja keuangan. Melalui perbandingan komparatif <i>ITime series</i> Iselama 14 tahun berurut-turut didapat bahwa kinerja keuangan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari kerugian yang diderita pada tahun tersebut.
4	Ratu Amalia SY (2007)	Analisis Dampak fasilitas Kmudahan impor tujuan ekspor (KITE) terhadap volume impor bahanbaku industri garment dantekstil di jawa tengah.	Model analisis yang digunakan adalah model regresi LSDV (Least Squares Dummy Variabel ).	Secara bersama-sama semua variabel bebasharga dalam negeri, harga luar negeri, volume ekspor dan nilai fasilitas serta variabel dummy tahun 2005 - 2006) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor
5	Adhella Risca Hapsari (2018)	Analisis Determinan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite) Terhadap Pertumbuhan Nilai	Metode analisis menggunakan Error Correction Model (ECM) yang dikembangkan oleh Engle-Granger.	Hasil analisis menunjukkan bahwa: (i) Fasilitas KITE yang diprogramkan oleh pemerintah diperuntukkan bagi pelaku industri yang berorientasi ekspor tembaga khususnya di Jawa Tengah dapat berdampak langsung dalam

		Ekspor Tembaga Di Provinsi Jawa Tengah Periode Januari 2015 - Mei 2017		mendorong pertumbuhan nilai ekspor tembaga.(ii) Perdagangan dunia dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan nilai ekspor tembaga di Jawa Tengah.(iii) Distribusi pasar dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan nilai ekspor tembaga di Jawa Tengah. (iv) Daya saing dalam jangka pendek mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan sedangkan jangka panjang mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan nilai ekspor tembaga di Jawa Tengah.
--	--	--	--	--

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan mengkaji data secara mendalam dan merupakan bentuk penelitian survei. Metode Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif menurut para ahli adalah :

- a. Menurut Strauss & Corbin, 2003 Penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
- b. Menurut Mc millan dan Schumacher, 2003, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasa peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang suatu fenomena, “kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan tidak langsung dalam dalam setting yang diteiti, kontekstual dan menyeluruh.(M. Yusuf, 2014).

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Jl. Satando No. 94 Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan PT. Mars Symbioscience Indonesia.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

#### **1. Studi Kasus**

Metode penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mengetahui fenomena, keadaan, latar belakang dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan berdasarkan suatu kesatuan sistem program berupa peristiwa atau kegiatan sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

Untuk mendapatkan data berupa informasi, studi kasus ini melakukan beberapa teknik seperti observasi, wawancara sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis. Studi kasus akan memahami dan menafsirkan suatu informasi yang didapat berdasarkan fenomena yang diteliti tersebut.

Berdasarkan pendekatan diatas, adapun korelasi KITE terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat kompleks, namun penelitian ini terfokus dengan melihat pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk meningkatkan ekspor dalam negeri.

KITE merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mendorong nilai ekspor. Ekspor memiliki pengaruh & peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional

melihat bahwa kontribusi perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi, maka banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar terus mendorong nilai ekspor. Namun, dampak dari KITE terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini masih sangat minim, dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang belum memanfaatkan fasilitas ini.

### **C. Jenis Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. (Arikunto, 1993)

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas data mengenai kinerja impor dan ekspor perusahaan.
2. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas.
3. Wawancara, peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pengurus / karyawan atau pimpinan Direktorat Jendral Bea dan Cukai kota Makassar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.
4. Studi kepustakaan ( *library research* ), yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet. (Nasution, 2003).

#### E. ***Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang sangat banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri.

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara.
2. Handphone yang berfungsi sebagai alat perekam.
3. Kamera.
4. Informan.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

##### **1. Pengolahan Data**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

##### **2. Analisis Data**

Peneliti dalam menganalisa data dikemudian hari akan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Penjabaran hasil penelitian akan menggunakan penggambaran dan menggunakan bahasa baku dan universal dan menghindari terlalu banyak bahasa-bahasa yang dapat membawa hasil analisis deskriptif nanti pada ketidakpahaman pembaca dalam melihat hasil analisis data. Secara khusus peneliti menggunakan



“metode kasus yang lebih sering digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antar variabel” (Kuncoro, 2009).

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan triangulasi data yaitu mengecek kebenaran data dengan cara membanding data dengan sumber lain.
2. Reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting.
3. Penyajian Data yaitu Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dengan mengelompokkan sesuai dengan sub bab masing-masing.
4. Penarikan kesimpulan Setelah data disajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. *Profil Instansi*

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di manapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai. Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/ cukai). Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-

undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

### **1. Profil Bea Cukai**

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan beralamat di Jl. Satando. No. 94 Kel. Malimongan Kec. Wajo Kota Makassar, berada dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai mengawasi 4 kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC), yaitu:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar) berlokasi di kota Makassar – Sulawesi selatan
2. KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare berlokasi di kota Parepare-Sulawesi Selatan
3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berlokasi di Malili – Sulawesi Selatan
4. KPPBC Tipe Madya Pabean C Makassar berlokasi di kota Kendari – Sultra

## **2. Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

### **a. Visi**

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

### **b. Misi**

- 1) Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- 2) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- 3) Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) demi tercapainya visi DJBC. Peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **3. Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:**

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **I. Tugas Pokok**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **II. Fungsi**

- a) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

### **5. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)**

Fasilitas Kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) merupakan fasilitas dengan pemberian pembebasan dan pengembalian Bea Masuk atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang tidak dipungut atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasil akhirnya untuk tujuan ekspor. Jelasnya bahwa fasilitas ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong kegiatan perdagangan internasional termasuk ekspor dengan tujuan meningkatkan aliran devisa yang masuk kedalam negeri dengan memberikan kemudahan terhadap transaksi internasional dalam hal ini importasi bahan baku atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi barang jadi untuk tujuan ekspor.
- b. Meningkatkan ekspor non migas dengan memberikan penyederhanaan tatacara pemberian fasilitas.
- c. Penggunaan produksi bahan hasil olahan untuk menunjang perekonomian dalam negeri

### **6. Jenis Fasilitas**

Pembagian jenis fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dibagi menjadi dua :

a. Fasilitas Pembebasan

Yaitu berupa fasilitas dengan pemberian pembebasan berupa bea masuk atau Cukai atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

b. Fasilitas Pengembalian

Yaitu fasilitas dengan pemberian pengembalian atas bea masuk atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat Penelitian ini yang menjadi obyek adalah fasilitas KITE untuk jenis fasilitas Pembebasan Bahan Baku saja, dan untuk selanjutnya dalam pembahasandisebutdengan fasilitas.

## **7. Persyaratan Pokok Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor**

Tiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan ingin menggunakan fasilitas KITE, wajib memiliki (Nomor Induk Perusahaan) NIPER yang dikeluarkan oleh kantor wilayah tempat pengajuan permohonan fasilitas ini. Prosedur penerbitan(NIPER) Nomor Induk Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan dengan lengkap dan benar, juga data pelengkap pengajuan NIPER, yaitu:
  - 1) Fotocopy akte notaris berdirinya perusahaan beserta perubahannya
  - 2) Fotocopi NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Penetapan PKP
  - 3) Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan
  - 4) Fotocopi Surat Ijin Usaha Industri , bagi perusahaan PMDN atau SIUT (Surat Ijin Usaha Tetap) untuk perusahaan PMA
  - 5) Fotocopi Ijin Prinsip dari BPM



- 6) Fotocopi identitas KTP/Paspor/Kitas Direksi dan Komisaris yang masih berlaku
  - 7) Bukti Kepemilikan Sertifikat Kepemilikan Tanah beserta Ijin HO gangguan, IMB dan Surat Keterangan Domisili
  - 8) Melampirkan struktur organisasi kantor / pabrik /perusahaan
  - 9) Melampirkan SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi Impor )
  - 10) Uraian proses produksi barang perusahaan
  - 11) Laporan Keuangan tahun terakhir
  - 12) Melampirkan denah lokasi pabrik dan Layout pabrik
  - 13) Dokumentasi berupa foto perusahaan
- b. Berdasarkan pengajuan DIPER, dilakukanlah penelitian terkait administratif lapangan terhadap kebenaran data perusahaan.
  - c. Peninjauan lapangan akan dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan DIPER dan hasilnya dituangkan dalam BeritaAcara Kesimpulan Hasil *Survey*
  - d. Jika lokasi perusahaan berada diluar kawasan Kantor Wilayah yang bersangkutan, peninjauan akan didelegasikan ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi perusahaan tersebut
  - e. Peninjauan kebenaran data dalam DIPER dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja dimulai sejak diterimanya Berita Acara Kesimpulan Hasil *Survey*.
  - f. Keputusan penerbitan nomor induk perusahaanjika memenuhi persyaratan, atau penolakan dalam hal tidak memenuhi persyaratanakan diberitahukan.

Apabila nomor induk perusahaan telah disetujui, maka perusahaan harus memasang papan nama perusahaan di lokasi perusahaan dengan mencantumkan nomor induk perusahaannya. Juga harus memberitahukan secara tertulis bila ada perubahan data yang terdapat dalam DIPER paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi.

Atas nomor induk perusahaan yang dimiliki dapat dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah, jika

- 1) Perusahaan tidak mampu melakukan kegiatan impor barang atau memproduksi bahan untuk memproduksi barang ekspor dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut terhitung sejak:
- 2) Nomor induk perusahaan diterbitkan
- 3) Tanggal realisasi ekspor atau penyerahan ke Kawasan Berikat habis
- 4) Perusahaan tidak memberitahukan adanya perubahan data pada administrasi perusahaan dalam waktu tiga puluh hari sejak adanya perubahan

Setelah pencabutan Nomor induk perusahaan, jika masih ada sisa fasilitas bea masuk atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang, maka wajib dilunasi selambatnya tigapuluh hari setelah tanggal pencabutan.

## **8. Kewajiban Perusahaan Fasilitas KITE**

Setelah perusahaan menerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor maka kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a) Melakukan proses produksi atas bahan baku yang telah di impor yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor

- b) Melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang .
- c) Ekspor barang harus terlaksana berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan yakni 12 bulan sejak pendaftaran PIB, kecuali perusahaan yang memiliki masa produksi yang lama atau lebih dari 12 bulan bisa diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan
- d) Terhadap PEB yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang barangnya telah diekspor Kantor Pabean menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan
- e) Perusahaan harus melakukan laporan pelaksanaan ekspor ke kantor wilayah sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
- f) Penyerahan Laporan Ekspor dengan menggunakan formulir laporan penggunaan barang atau bahan yang diimpor yang mendapat Pembebasan bea masuk atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut (BCL.KT01), yang dilampiri:
  - 1) *Fotocopy* PIB
  - 2) Melampirkan kopian SPPB
  - 3) Melampirkan LHP Asli
  - 4) *Fotocopy* STTJ
  - 5) *Fotocopy* PEB yang telah di SAH kan
  - 6) *Fotocopy Bill of Lading* atau *Airway Bill*
  - 7) Terbitkan SPPJ yang mampu menunjukkan jumlah bea masuk atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai

dipertanggungjawabkan atau yang masih harus dijaminan oleh perusahaan.

- 8) jika terhadap bea masuk atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan, maka jaminan yang pernah diserahkan akan dikembalikan selama empat belas hari kerja setelah SPPJ diterbitkan.
- 9) Apabila terhadap bea masuk atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang masih harus dijaminan perusahaan dapat mengganti jaminan sesuai dengan nilai jaminan yang sebelumnya diserahkan yang ditetapkan dalam SPPJ.

Sebanyak 32 perusahaan merupakan perusahaan yang baru bergabung dengan menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dimulai sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, sedangkan ada tujuh puluh dua perusahaan lainnya sudah bergabung sejak masih dalam pengawasan Bapeksta Keuangan sampai akhir tahun 2003. Hal tersebut dapat dilihat melalui format nomor induk perusahaan. Sebanyak seratus empat perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan impor tujuan ekspor ini menunjukkan bahwa ada perusahaan yang sampai saat ini dinyatakan aktif menggunakan fasilitas tersebut.

Sedangkan untuk perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan yang tidak aktif menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor selama 12 bulan berturut-turut, maka nomor induk perusahaan akan dicabut dan untuk menggunakan kembali fasilitas ini, maka perusahaan tersebut harus mengajukan

permohonan kembali sebagaimana perusahaan baru mendapatkan NIPER baru dan tidak dengan mengaktifkan NIPER lama. tahap selanjutnya, perusahaan yang telah memiliki Nomor induk perusahaan akan melakukan aktivasi program aplikasi komputer sebelum mengajukan permohonan fasilitas ini .

Perusahaan akan membuat rancangan rencana bahan baku yang akan diimpor dalam hal ini bahan diperlukan dalam kurun waktu satu tahun yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi perusahaan, yang dibuktikan dengan adanya kontrak ekspor perusahaan atau realisasi ekspor 12 bulan yang lalu. Namun jika perusahaan ternyata membutuhkan bahan baku yang lebih banyak dibandingkan dengan permohonan bahan baku impor yang dimasukkan dalam syarat. Maka perusahaan tersebut bisa melakukan permohonan kembali dengan mencantumkan sisa berat bahan baku atau penolong yang dibutuhkan. Jadi dalam kurun waktu satu tahun, perusahaan pengguna fasilitas bisa mendapatkan lebih dari satu SK, dengan alasan antara lain:

1. Bahan baku yang akan diimpor berbeda dengan yang terdapat dalam SK namun untuk produksi yang sama
2. Bahan baku yang diimpor telah direalisasikan dengan menggunakan SK sebelumnya,
3. Adanya pesanan baru ataupun pasar baru yang menggunakan bahan baku yang berbeda dengan bahan baku yang digunakan sebelumnya.

Berdasarkan barang impor telah dilakukan dengan menggunakan SK Pembebasan bahan baku dengan dokumen impor/ PIB, perusahaan wajib menyerahkan jaminan sebesar nilai Bea masuk dan PPN yang dibebaskan,

sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan. Jaminan yang diserahkan tersebut, dapat dikembalikan setelah perusahaan tersebut melakukan proses produksi dengan menggunakan bahan baku impor tersebut dan barang hasil produksinya kemudian diekspor sesuai dengan syarat dalam penggunaan fasilitas ini.

Setelah barang diekspor sesuai dengan dokumen ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang dan Laporan Hasil Pemeriksaan, maka perusahaan wajib melakukan pelaporan terhadap realisasi ekspor tersebut dengan tujuan mengambil jaminan yang telah diserahkan sebelumnya. Jaminan dapat dikembalikan seluruhnya, ketika perusahaan telah mengekspor atas jumlah impor bahan baku. Apabila nilai ekspornya dilaporkan tidak secara menyeluruh (sebagian), maka jaminan juga tidak dapat diambil secara langsung, namun secara bertahap, berdasarkan nilai ekspornya,.

Jika perusahaan tidak mampu memberikan laporan realisasi ekspor berdasarkan nilai impor yang telah ditetapkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan yakni 12 bulan masa proses produksi, maka jaminan yang telah diserahkan dapat dilakukan pencairan dengan denda yang berlaku, dengan pertanggung jawaban oleh Bank atau Perusahaan Asuransi. Bila atas bahan impor tidak direalisasikan sepenuhnya, maka pihak perusahaan setidaknya membayar pajak, bea masuk, PPn dan PPnBM sejumlah bahan impor yang tersisa.

Perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan impor tujuan ekspor dapat dinonaktifkan sementara atau dengan kata lain diblokir sementara bila yang bersangkutan atau dalam hal ini perusahaan pengguna tidak segera memenuhi kewajibannya, antara lain, ada dokumen impor (PIB) yang telah jatuh tempo

namun tidak dilakukan perpanjangan kontrak, dokumen impor yang telah dicairkan namun belum terpenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pencairan tersebut. Apabila perusahaan melakukan kewajibannya secara rutin dengan mengimpor bahan baku / penolong dan kemudian mengekspor kembali hasil produksi olahan berdasarkan bahan baku tersebut maka hal seperti tersebut di atas tidak perlu terjadi.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemanfaatann fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk meningkatkan ekspor dalam negeri**

Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) muncul karena sebagian besar perusahaan eksportir melakukan importasi bahan baku ataupun bahan penolong atas produk ekspornya. Kegiatan produksi barang ekspor tersebut membutuhkan barang / bahan baku yang tidak ada didalam negeri dengan kualitas yang dibutuhkan dari *buyer* yang ada diluar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bpk. Tommy prasetyo utomo selaku kepala seksi perijinan dan fasilitas II DJBCSulsel, bahwa ada beberapa tujuan dari diadakannya fasilitas KITE ini. Penjelasan narasumber

*Direktorat jenderal bea cukai senantiasa berperan aktif dalam mendorong peningkatan kegiatan ekspor, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi. Nilai ekspor senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap perlu didorong agar semakin meningkat, sehingga pertumbuhannya makin pesat. Dengan Fasilitas KITE, tidak perlu adanya penempatan pegawai di perusahaan namun kewajiban pada negara masih dapat dipastikan melalui mekanisme pemberian jaminan.*

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melihat bahwa beberapa perusahaan besar yang berorientasi ekspor melihat peluang yang lebih

menguntungkan ketika mengimpor bahan baku karena harga dari luar negeri lebih murah dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan persediaan bahan baku lokal, sehingga fasilitas KITE hadir dengan terobosan baru .

Proses pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) membantu setiap perusahaan mendapatkan bahan baku dengan mudah, selain itu perusahaan juga mendapatkan fasilitas berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPnBM tidak dipungut pengembalian bea masuk yang telah dibayar. adapun prosesnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Perolehan NIPER
- b. Melakukan Impor bahan baku

Dengan adanya fasilitas KITE ini, maka perusahaan / industri besar yang berorientasi ekspor akan berusaha meningkatkan volume impornya mengingat fasilitas ini memberikan pembebasan pembayaran bea masuk dan sebagai ganti pembayaran perusahaan wajib menjaminkan pungutan negara dengan tujuan untuk kegiatan produksi yang hasilnya akan diekspor.

*Dengan pemanfaatan ini, selain kemudahan mendapatkan bahan baku juga perusahaan mendapatkan fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk dan PPN dan PPnBM tidak dipungut atau pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar.*

Melihat proses pemanfaatan fasilitas KITE, peneliti menganggap bahwa perusahaan yang memiliki kinerja ekspor yang baik dengan peluang pasar yang besar, sangat menguntungkan menggunakan fasilitas KITE ini, karena pembelian bahan baku maupun bahan penolong tidak dikenakan bea masuk, PPN dan PPnBM sehingga bisa digunakan untuk penambahan jumlah produksi atau peningkatan jumlah produk perusahaan, dengan itu volume ekspor senantiasa



meningkat dari tahun ketahun. Peraturan Fasilitas KITE juga merupakan salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor, maka dari itu peraturan ini selalu mendapatkan revisi dalam rangka perbaikan dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.

Tahap pertama yang dilakukan dalam pemberian fasilitas KITE adalah dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan yang akan menggunakan fasilitas KITE. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui eksistensi perusahaan dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor selama perusahaan tersebut beroperasi sehingga pemberian fasilitas tidak salah sasaran. Pada tahap ini akan diterbitkan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) apabila perusahaan tersebut dinilai layak mendapatkan fasilitas KITE.

Pemanfaatan fasilitas KITE untuk mendorong ekspor dalam negeri dinilai dari beberapa indikator, yakni dengan melihat proses pemanfaatan fasilitas KITE di kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbagsel. Dalam hal ini pihak Customs telah mensosialisasikan fasilitas KITE kepada perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, namun berdasarkan fakta di lapangan penyampaian sosialisasi tersebut belum maksimal karena masih banyaknya perusahaan yang tidak melihat fasilitas ini. Yang kedua melihat efektifitas dari pengguna fasilitas KITE dalam suatu perusahaan dengan cara mengamati perbandingan ekspor perusahaan dalam waktu tertentu sebelum dan setelah menggunakan fasilitas ini, juga dengan melihat perbandingan devisa perusahaan pengguna fasilitas KITE.

Beberapa perusahaan yang menggunakan fasilitas ini tentu telah merasakan manfaat dari fasilitas KITE, namun masih ada beberapa perusahaan

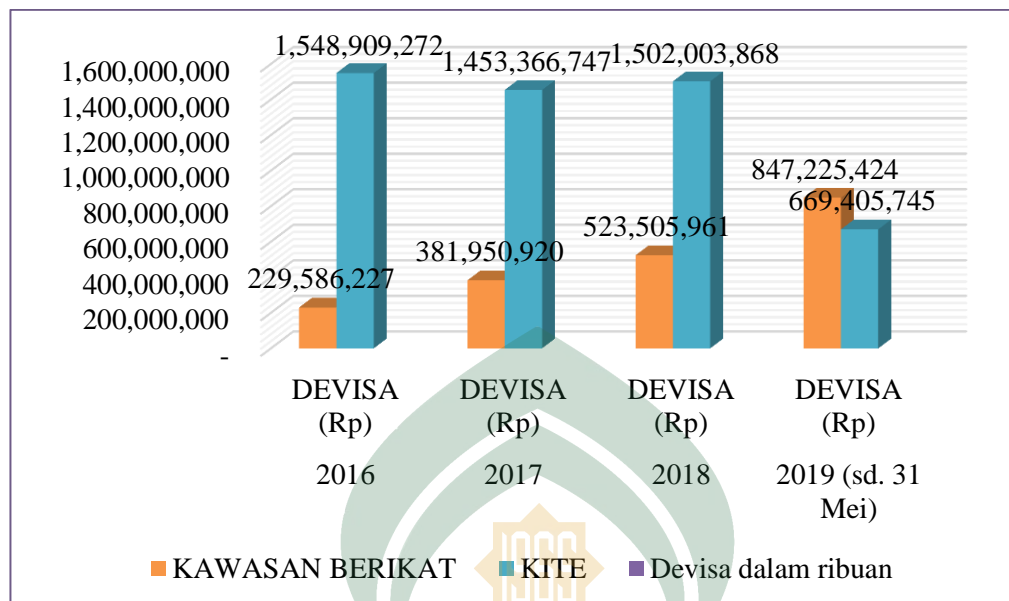
yang tidak melakukan ekspor secara terus menerus dalam kurun waktu yang sama, dikarenakan perusahaan tersebut tidak bisa mencapai target waktu ekspor yang sudah ditetapkan di fasilitas KITE.

Berdasarkan data, nilai devisa perusahaan pengguna fasilitas KITE jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas ini. Hal ini dikarenakan perusahaan pengguna fasilitas kite mampu memproduksi lebih banyak dengan menambah jumlah input/bahan baku/bahan penolong untuk meningkatkan volume ekspor.

*Untuk Kanwil Sulawesi bagian selatan ada 4 Perusahaan yaitu PT. Mars Symbioscience Indonesian dan PT. Comextra Majora berlokasi di Sulawesi Selatan dan PT. Cahaya Modern Metal Industri dan PT. Bintang Smelter Indonesia yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.*

Salah satu dari empat perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE di Sulawesi bagian selatan adalah PT. Mars Symbioscience Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak 1996 di Makassar, yang bergerak dibidang industri Kakao. Perusahaan ini telah menjadi salah satu eksportir Kakao terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengklaim telah merasakan manfaat dari adanya penggunaan fasilitas KITE. Dengan dibebaskannya pajak impor bea masuk dan PPn maka perusahaan ini bisa melakukan *cost saving* dan mengalokasikan biaya tersebut untuk bisa melengkapi keperluan perusahaan yang lain.

**Diagram 1.1 : Perbandingan devisa Ekspor perusahaan pengguna fasilitas KITE**



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2019

Adanya peningkatan volume impor yang diakibatkan adanya pemberian fasilitas KITE menyebabkan keluarnya aliran rupiah ke luar negeri. Namun apabila kemudian pengusaha melakukan kegiatan ekspor maka aliran dana akan masuk kembali ke dalam negeri dengan nilai yang lebih besar dari nilai yang keluar pada saat melakukan impor. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan berorientasi profit sehingga tidak mungkin mereka mau merugi. Jadi dengan kata lain dampak pemberian fasilitas KITE menyebabkan aliran dana yang masuk ke dalam negeri akan membuat surplus Neraca Perdagangan.

## 2. Kendala dalam Fasilitas KITE

Kendala perusahaan mengapa masih banyak yang belum memanfaatkan fasilitas KITE karena masih belum efektifnya sosialisasi mengenai fasilitas ini, sehingga fasilitas KITE dimanfaatkan sebagian besar perusahaan yang ada di

pulau jawa saja, Barang / Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan masing menggunakan barang / bahan baku lokal serta belum adanya kegiatan impor pada perusahaan, yang menjadi permasalahan lain yaitu sebagian besar perusahaan belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KITE.

Peneliti menganggap bahwa masih banyak perusahaan industri yang memproduksi dengan menggunakan barang/bahan baku lokal, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu untuk mengimpor lagi, perusahaan yang seperti ini biasanya perusahaan yang belum memiliki pasar diluar negeri sehingga proses penjualan hanya dilakukan dalam negeri, perusahaan seperti ini juga sulit untuk memainkan harga produk, karena harga dari bahan baku lokal sendiri terbilang tinggi dibandingkan dengan harga bahan baku dari luar.

Sulawesi selatan sendiri masih memiliki beberapa perusahaan yang juga belum pernah ada riwayat impor sehingga perusahaan tersebut belum menggunakan fasilitas ini, perusahaan seperti ini biasanya memproduksi output yang tidak terlalu besar, sehingga sistem pemasaran dilakukan di dalam negeri karena tidak memenuhi persyaratan ekspor, namun peneliti melihat pihak bea cukai terus melakukan sosialisasi mengenai fasilitas ini kepada tiap-tiap perusahaan yang berorientasi ekspor, guna untuk meningkatkan nilai ekspor perusahaan yang berdampak positif terhadap nilai ekspor nasional.

*Untuk wilayah sulawesi bagian selatan, penyebab perusahaan belum menggunakan fasilitas, antara lain :Barang/bahan baku yang digunakan oleh perusahaan masih menggunakan Barang/bahan baku lokal, Kegiatan impor perusahaan belum ada, Persyaratan pemenuhan fasilitas tersebut belum lengkap/belum memenuhi.*

Konsep dari beberapa persyaratan pemenuhan fasilitas tersebut yang belum lengkap atau belum terpenuhi oleh perusahaan, perusahaan yang berorientasi ekspor selalu mencari fasilitas yang lebih mudah sehingga tidak perlu untuk menyediakan banyak dokumen untuk memenuhi syarat pemanfaatan fasilitas. Salah satunya ketika perusahaan diharuskan untuk mengekspor kembali hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan dan ketika perusahaan diharuskan untuk menerapkan penggunaan *It Inventory* sebagai alat pengontrol dalam perdagangan ekspor impor perusahaan.

Berdasarkan pernyataan narasumber dari pihak beacukai, bahwasanya Penerapan *It Inventory* sendiri baru berlaku pada PMK 176 & PMK 177 dari persyaratan yang diberikan untuk menerbitkan NIPER yang diutamakan adalah *IT Inventory*-nya. Hal ini peneliti menganggap wajar sebab sebagai pelaksana fungsi pengawasan bea cukai mempunyai akses yang mudah dan terkomputerisasi untuk mengawasi perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas dalam memanfaatkan fasilitas ini. Bea cukai dapat mengontrol perusahaan melalui *It Inventory*. Hal ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi perusahaan, dimana perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan oleh karyawan. Namun beberapa perusahaan belum menerapkan *It Inventory* disebabkan pengadaanya yang mahal yang tentu memakan biaya yang besar.

Beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor di dalam kawasan Asia lebih memilih untuk menggunakan kesempatan kerjasama antar negara-negara asia yang disebut AFTA (ASEAN Free Trade Area) Kemudahan yang dihadirkan dalam bentuk kerja sama perdagangan dan ekonomi di wilayah

ASEAN membuat fasilitas KITE kurang diminati bagi pelaku industri dalam negeri, AFTA di kawasan asia tenggara yang menyediakan fasilitas tidak ada hambatan tarif dan non tarif bagi negara-negara yang bergabung dalam ASEAN, yang menyebabkan penurunan minat dalam menggunakan fasilitas KITE, terutama bagi industri yang mengimpor bahan baku dari kawasan Asia.

### **3. Pengaruh Fasilitas KITE terhadap nilai Ekspor**

Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas fiskal yang diberikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk mendorong ekspor dengan memudahkan impor. Fasilitas fiskal ini diberikan jika ada komponen bahan baku/bahan penolong yang harus di impor berupa pembebasan, pengembalian bea masuk dan cukai. Bahan baku lokal tetap diperlukan dan digunakan oleh perusahaan eksportir, karena komponen lokal masih merupakan komponen utama dari produk ekspor perusahaan.

*Kegiatan impor biasanya dilakukan karena negara tersebut tidak bisa menyediakan barang atau bahan baku yang dibutuhkan masyarakat atau tidak mencukupi atau tidak dapat mengimbangi permintaan konsumsi nasional. Hal inilah yang menyebabkan mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk mengimpor barang atau jasa dari negara lain, yaitu untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan penduduk negara itu dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah atau efisien. Mungkin juga bahan baku / bahan penolong yang ada di dalam negeri tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh buyer atau pembeli yang ada diluar. Dengan bea cukai memfasilitasi perusahaan dengan KITE akhirnya malah mendorong Perusahaan untuk meningkatkan ekspornya.*

Fasilitas KITE berperan membantu para pengusaha ekspor untuk mengeliminasi biaya produksi yang berasal dari nilai bea masuk yang harus dibayar atas impor bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi. Mengeliminasi biaya untuk membayar bea masuk dapat menekan

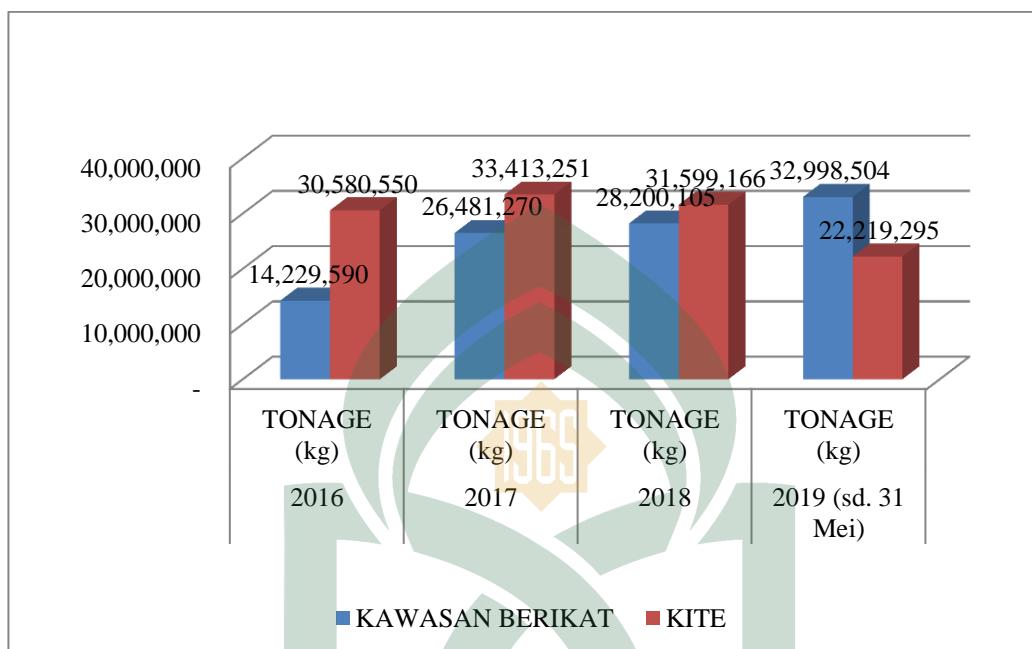
biaya produksi barang sehingga dapat menurunkan harga barang ekspor. Berdasarkan hukum permintaan, ketika harga barang turun maka permintaan akan naik. Dalam hal ekspor KITE, nilai fasilitas akan menurunkan biaya produksi yang berdampak pada turunnya harga barang sehingga barang KITE menjadi lebih murah di pasar dan mendorong kenaikan permintaan.

Berdasarkan informasi dari pihak beacukai, yang menjadi perhatian khusus bagi peneliti bahwa fasilitas ini adalah fasilitas yang tidak memonopoli bahan baku dalam negeri, karena yang menjadi bahan utama bagi perusahaan berasal dari dalam negeri itu sendiri, terdapat beberapa persyaratan ketika ingin menggunakan fasilitas ini, diantaranya berat bahan impor yang memiliki batas tersendiri sehingga tidak semuanya produk perusahaan berasal dari bahan impor. Fasilitas ini sangat menunjang ekspor sehingga perusahaan bisa memproduksi lebih banyak lagi.

Selanjutnya dampak akhir dari nilai fasilitas yang diberikan sangat tergantung dari elastisitas permintaan dari barang ekspor. Jika permintaan barang ekspor sensitif terhadap penurunan harga maka permintaan ekspor akan terjadi dalam jumlah yang besar. Terdorongnya ekspor diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri sehingga membuka peluang lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja Indonesia. Potensi penyerapan tenaga kerja ditunjukkan oleh data Direktorat Fasilitas Kepabeanan per Agustus 2016, di mana jumlah perusahaan KITE yang ada di seluruh kantor wilayah DJBC yang melayani fasilitas KITE yang berjumlah 451 perusahaan, telah

mampumenyerap sekitar 286.084 tenaga kerja. Berikut data *Tonnage* perusahaan pengguna fasilitas KITE.

**Diagram 1.2 :Tonage Ekspor Perusahaan Fasilitas**



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2019

Berdasarkan data yang menunjukkan akumulasi ekspor dalam 3 tahun terakhir dilihat bahwa perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE memiliki *tonnage* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas KITE. Data tersebut menunjukkan perbandingan perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan perusahaan pengguna fasilitas kawasan berikat dengan perbandingan 5:4 perusahaan, terdiri atas 4 perusahaan KITE, dan 5 perusahaan yang menggunakan fasilitas kawasan berikat. Rekapitulasi data ekspor dan impor 4 perusahaan pengguna fasilitas KITE di kawasan sulawesi bagian selatan periode januari – april 2019



Dalam aktivitas pelayanan fasilitas KITE, dilakukan dengan menerapkan program aplikasi komputer yang sudah tersedia, sehingga semua data yang masuk akan tersimpan secara otomatis dalam file operasional komputer fasilitas KITE. Sistem aplikasi yang telah dilaksanakan tersebut sangat membantu kelancaran keluar masuknya barang dari dan ke negara tujuan karena dengan otomatis dapat memberikan waktu pelayanan yang lebih cepat dan akurat, namun ketelitian dan kecermatan petugas dan pejabat pelayanan KITE juga diperlukan dalam memberikan setiap keputusan yang akan berdampak pada kerugian negara apabila memberikan keputusan yang tidak tepat.

**Tabel 2.1 : Data Ekspor Impor Januari – April\***

No	Bulan	Jumlah Ekspor	Jumlah Impor	Perbandingan	Rasio
1	Januari	408.506.591.271,58	166.948.439.250,90	2,45	4,12
2	Februari	166.492.011.542,03	59.204.951.829,00	2,81	2,77
3	Maret	125.541.823.570,75	18.209.190.638,00	6,89	60,79
4	April	116.475.756.158,80	44.779.036.020,60	2,60	3,10

Sumber : Kanwil DJBC Sulbagsel, 2019 Data diolah

Berdasarkan data diatas, yang menerangkan total ekspor dan total impor 4 perusahaan yang ada di kawasan sulbagsel yang diberikan fasilitas KITE, bahwa Perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE ini terlihat terus melakukan kegiatan ekspor dan impor tiap bulannya, dengan nilai perdagangan yang bervariasi, dimana rasio perbandingan ekspor impornya juga ikut bervariasi. Pada bulan januari, rasio perbandingan ekspor impor ada pada angka 2,45 %, disusul pada bulan maret dengan rasio perbandingan yang lumayan besar yakni pada

angka 6,89%. Rasio perbandingan ini menggambarkan bahwa perusahaan tersebut telah mendapatkan manfaat dari fasilitas ini sebesar rasio tersebut pula.

Kegiatan impor biasanya dilakukan karena negara tersebut tidak bisa menyediakan barang atau bahan baku yang dibutuhkan masyarakat, sehingga menyebabkan mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk mengimpor barang atau jasa dari beberapa negara lain, yaitu untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan penduduk di negara tersebut diperoleh dengan harga yang murah atau efisien dan juga bahan baku / bahan penolong lainnya yang ada di dalam negeri tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh *buyer*.

Dengan adanya bea cukai memfasilitasi perusahaan dengan fasilitas KITE akhirnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan kegiatan ekspornya, peneliti melihat bahwa kegiatan impor dalam suatu negara tidak selalu berdampak negatif, melihat fasilitas KITE ini memudahkan perusahaan untuk mengimpor bahan baku atau bahan penolong, namun kemudahan impor tersebut dengan tujuan agar barang tersebut diolah sehingga adanya nilai tambah yang tercipta dan kemudian diharuskan untuk mengekspor ulang.

Dari kegiatan ekspor impor tersebutlah yang akan mempengaruhi perekonomian nasional. Peneliti menganggap bahwa konsep kebijakan dari bea cukai ini tidak hanya dinilai dari seberapa banyak barang / bahan baku yang di impor oleh pelaku industri, tapi melihat dari seberapa efektif perusahaan tersebut melakukan produksi, dan seberapa efisien perusahaan tersebut melakukan ekspor.

Salah satu penyebab mengapa para pengusaha mau mendatangkan bahan baku dari luar negeri adalah karena harga barang tersebut di dalam negeri lebih mahal dari harga bahan di luar negeri, disamping faktor kualitas bahan juga berpengaruh dalam hal ini.

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE secara umum selalu menunjukkan peningkatan pada nilai ekspornya. Data yang disajikan dalam penyajian data dimana peneliti memilih 4 perusahaan pengguna fasilitas KITE yang memiliki NIPER untuk melihat kinerja ekspor masing-masing perusahaan sebagai pengguna KITE. Analisis terhadap 4 perusahaan tersebut yang merupakan pengguna fasilitas KITE yang masih memiliki NIPER di wilayah Kanwil DJBC Sulbagsel, hasil yang didapat ialah :

**Tabel 2.2 : Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE**

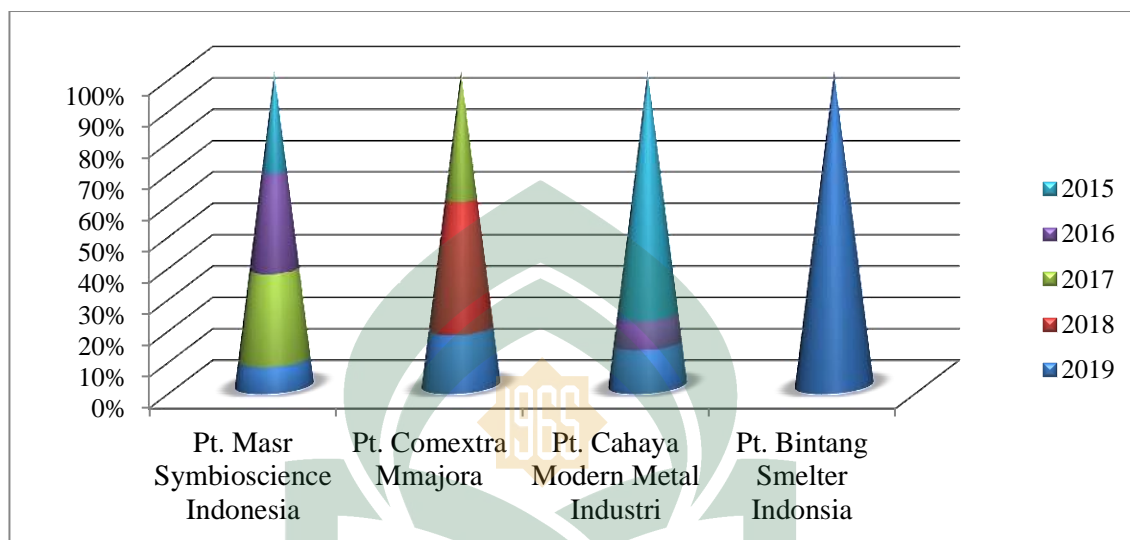
<b>Nama perusahaan</b>	<b>Jenis Fasilitas</b>
PT. Mars Symbioscience Indonesia	Pengembalian
PT. Comextra Majora	Pembebasan
PT. Cahaya Modern Metal Industri	Pembebasan
PT. Bintang Smelter Indonesia.	Pembebasan

Sumber : Kantor wilayah bea cukai, 2019

Dari 4 perusahaan, PT. Mars symbioscience Indonesia menggunakan fasilitas pengembalian sejak 2014 – sekarang, sedangkan 3 perusahaan lainnya menggunakan jenis fasilitas pembebasan. Namun tahun ini PT. Mars symbioscience Indonesia beralih menggunakan jenis fasilitas Pembebasan, hal ini

dikarenakan PT. Mars symbioscience Indonesia melihat adanya peningkatan ekspor kakao setiap tahunnya.

**Diagram 1.3 : Rekapitulasi data eksporPerusahaan pengguna fasilitas KITE**



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulbagsel, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari kanwil DJBC Sulbagsel menunjukkan ketidakstabilan nilai ekspor pada fasilitas KITE selama tahun 2015 – 2019\*. pada tahun 2015 – 2018 hanya ada dua perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor secara berturut-turut. Perusahaan PT. Mars Symbioscience Indonesia melakukan ekspor barang jadi dengan nilai ekspor sejumlah Rp. 710,004,557,471,58 dan mengalami penurunan pada tahun 2016, yakni nilai ekspor hanya berkisar Rp. 697,471,808,252,76, terus mengalami penurunan nilai ekspor pada tahun 2017 yakni Rp. 646,621,663,092,00 , kemudian merangkak naik lagi pada tahun 2018 sebesar Rp. 735,072,839,859,88, dan data sementara pada tahun 2019 nilai ekspor perusahaan ini sampai triwulan pertama senilai Rp. 192,063,869,942.93. Berikut Rekapitulasi data ekspor tiap perusahaan

Namun dengan begitu, perusahaan yang bergerak dalam industri kakao ini merasakan manfaat yang dibidang ekspor dengan adanya peningkatan jumlah produksi, yang ditunjukkan pada data berikut :

**Tabel 2.3 : Jumlah produksi setelah dan sebelum menggunakan KITE**

PT. Mars Symbioscience Indonesia	Jumlah produksi setelah menggunakan / tahun (1996-2014)	Jumlah produksi sebelum menggunakan tahun (2014-2019)
	±2000 ton	±3500 ton

Sumber : PT. Mars Symbioscience Indonesia, 2019

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari PT Mars Symbioscience Indonesia, memiliki persentasi peningkatan ekspor setelah menggunakan fasilitas ini menunjukkan peningkatan sebesar 20% - 40% sedangkan perbandingan ekspor setelah dan sebelum menggunakan fasilitas ini dilihat dari jumlah produksi pertahunnya. Sebelum menggunakan fasilitas ini perusahaan bisa memproduksi ±2000 ton kakao olahan / tahun, dan setelah menggunakan fasilitas KITE perusahaan ini menembus produksi ± 35000 ton kakao olahan/tahun. Hal tersebut juga memiliki pengaruh pada harga dari produk yang dipasarkan, karena *cost saving* pada BM dan PPn maka dalam proses barang mentah menjadi barang jadi memiliki kenaikan nilai 60%.

Data juga menunjukkan bahwa perusahaan PT. Comextra Majora terus mengalami peningkatan ekspor, perusahaan ini menggunakan fasilitas jenis KITE pembebasan, dimana pada tahun 2017 nilai ekspor Rp. 754,604,785,006,28 kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi Rp. 766,931,027,853,33, dan data sementara untuk tahun 2019 triwulan pertama mencapai nilai ekspor Rp.

344,779,828,958,90. Peneliti melihat bahwa beberapa perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini setiap tahunnya melakukan kegiatan perdagangan, ketidakstabilan ekspor yang dihasilkan beberapa perusahaan menunjukkan fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177 belum menunjukkan maksud utamanya untuk meningkatkan ekspor.

Merujuk dari data yang diperoleh 2 perusahaan pengguna fasilitas KITE yakni PT. Cahaya Modern Metal Industri dan PT. Bintang Smelter Indonesia ini, selama 3 tahun terakhir sama sekali tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga *tonnage* dan nilai devisa perusahaan tersebut nihil. Peneliti mengindikasikan bahwa, fasilitas KITE belum bisa untuk membuat tiap perusahaan merasakan hasil yang maksimal.

#### **4. Pengaruh Nilai Impor terhadap NilaiEskpor KITE**

Jumlah faktor produksi dalam hal ini bahan baku akanmendorong peningkatan hasil produksi yang akan diekspor. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Efi (2008) tentang analisis pengaruh faktor produksi modal, bahan baku tenaga kerja dan mesin terhadap produksi glycerine yang menyimpulkan bahwa bahan baku merupakan faktor yang paling dominanberpengaruh terhadap produksi glycerine.

peningkatan produksi komoditasekspor akan mendorong peningkatanpenawaran ekspor. Hal ini sebagaimanapengujian yang dilakukan Lubis (2010) tentang Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor diIndonesia yang menyimpulkan bahwa impor bahan baku memiliki pengaruh yang baik terhadap penawaranekspor.Penawaran ekspor yang tinggi jika

berdampingan dengan permintaan ekspor yang tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terkait pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk meningkatkan ekspor dalam negeri, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peningkatan ekspor sebelum dan setelah adanya fasilitas KITE telah terlihat hasilnya dalam 4 perusahaan pengguna fasilitas KITE, sebagai contoh, yang diteliti *annual report*nya untuk melihat jumlah penjualan ekspor perusahaan tersebut dalam kurun waktu 5 tahu peningkatan penjualan ekspor mulai pada tahun 2015 – 2019\*
2. Fasilitas KITE akan berjalan dengan efektif dalam meningkatkan ekspor perusahaan pengguna, namun fasilitas ini belum berhasil menarik perusahaan lainnya untuk bergabung, dikarenakan persyaratan dan kemampuan perusahaan yang belum memungkinkan.
3. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE diantaranya, mahalnya pengadaan sistem aplikasi *it Inventory* serta sumber daya manusia yang belum mampu menggunakan sistem dalam aplikasi tersebut. Hal ini menyebabkan berkurangnya minat perusahaan dalam menggunakan fasilitas KITE. Selain pengadaan *it inventory* hal lain yang menjadi penyebab kurangnya pengguna fasilitas KITE karena adanya pemberlakuan AFTA dikawasan ASEAN, sehingga



bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku dalam kawasan ASEAN lebih memilih menggunakan fasilitas tersebut.

4. dari 4 perusahaan pengguna fasilitas KITE yang berada di kawasan Sulawesi selatan, PT. Mars Symbioscience Indonesia menjadi perusahaan yang selalu mengalami peningkatan pada jumlah produksi tiap tahunnya, sehingga perusahaan ini beralih menggunakan fasilitas pembebasan yang sebelumnya menggunakan fasilitas pengembalian.
5. Setiap perusahaan yang ingin menggunakan fasilitas ini harus memenuhi beberapa syarat, seperti penggunaan NIPER dan perusahaan tersebut harus mengekspor balik atas kegiatan impornya, perusahaan harus memenuhi aturan-aturan kelengkapan berkas yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan, perusahaan juga harus memenuhi beberapa syarat berkenaan dengan pembelian aplikasi pengontrol untuk menjalankan fasilitas KITE ini.

#### **B. Saran**

1. Agaknya pengadaan *It inventory* perlu untuk dikaji ulang atau diberikan kemudahan untuk pengadaannya hanya terkait dengan penggunaan fasilitas KITE saja sehingga industri dalam negeri juga dapat menikmati fasilitas ini
2. kemudahan fasilitas yang diberikan haruslah tepat sasaran karena pembebasan pajak terhadap suatu alur produksi sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama ketika perusahaan tersebut diberikan pembebasan pungutan dalam rangka impor. Pengawasan

yang diberikan juga baiknya diperketat sebab, fasilitas ini dibuat dengan karakteristik khusus dimana diwajibkan impor juga diwajibkan ekspor, pengawasan yang ketat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan dan fasilitas KITE benar-benar digunakan untuk meningkatkan ekspor dalam negeri sehingga dapat memajukan perekonomian bangsa dan merangsang berkembangnya industri dalam negeri, terutama yang ingin melebarkan pasarnya ke luar negeri.

3. Untuk kedepan diharapkan adanya fasilitas – fasilitas seperti KITE yang sangat membantu perusahaan dalam melakukan *Development Product*, yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar sehingga akan adanya *Cost Saving* yang bisa dialokasikan kepada perusahaan.
4. Untuk penyediaan data sebaiknya lebih lengkap dan terarah lagi, agar mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang ekonomi internasional bisa lebih mudah dalam mengakses data tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah*. Ar-Rusdi. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Almutmainnah. (2016). *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia*. Mmum. Universitas Negeri Makassar.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,.
- Benny, J. (2013). Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal*, 1(4).
- Blair, 1991; Hoover, 1984. (1984). Posisi Dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional, 16(1), 41–53.
- Darwanto, T. U. &. (2013). Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), 1–13. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Dasilveira, R. (2002). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Di Indonesia. *Mycological Research*, 106(11), 1323–1330.
- Gilang, D. (2015). Pemanfaatan Fasilitas KITE untuk Peningkatan Ekspor Dalam Negeri Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim, Sidoarjo. *Nasional*, 6(2), 1–7.
- Hapsari, A. R. (2018). *Analisis Determinan Fasilitas KITE Terhadap Pertumbuhan Nilai Ekspor Tembaga Di Provinsi Jawa Tengah Periode Januari 2015-2017*. Universitas MUhammadiyah Suarakarta.
- Hasibuan, A. M., Sudjarmoko, B., & Listyati, D. (2012). Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usahatani Pala. *Jurnal Buletin RISTRI*, 3(3), 223–230. <https://doi.org/10.21082/jtidp.v3n3.2012.p223-230>
- Hidayati, N. (2016). *Pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor 2012 - 2015*. Mmum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husada, P. A. (2016). Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Artikel Jurnal Analisa Sosiologi Oktober*, 2016(2), 40–52. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/227635-pembangunan-dan-kesejah-7d176a2c.pdf>
- Indrawan, A. D. (2015). *Peranan industri besar dalam tingkat penyerapan*

*tenaga kerja di Indonesia*. Universitas MUhammadiyah Malang.

Januar Dona Pribadi. (2012). *Analisa Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ)*. Jakarta. Kekhususan Admin Bisnis Internasional.

Jumiana. (2017). *Pengaruh Ekspor dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. UIN ALauddin Makassar.

Kementrian Agama RI. (1990). *AL-Quran dan terjemahnya*. (P. K. T. Putra, Ed.). Semarang.

Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tanggal 31-12-2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 14/BC/2005 tanggal 29-07-2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31-12-2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Lestari, A. Z. (2010). *Pertumbuhan Ekonomi Regional*.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/PMK.04/2016*.

Miftahul Jannah. (2017). *Jual Beli Tanah Sawah Milik Bersama Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa*. UIN Alauddin Makassar.

Miranti, D. (2015). *Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor, dan Pendapatan Nasional terhadap Nilai Tukar & Daya Beli Masyarakat Indonesia*. Retrieved from [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id%0A114](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id%0A114)

Nasution, S. (2003). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Paksi, A. K. E. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Lampung.

Paramarta, Y. A., Umum, P., Pardede, M., Umum, W. P., Mariani, Y., Redaksi, P., ... Redaksi, A. D. (2016). *De Jure. International*, 16(511).

Perdagangan, K. (2016). *Evaluasi Manfaat Pusat Logistik Berikat Dalam*

Mendukung Daya Saing Industri Nasional.

- Priyono, D., & Wirathi, I. G. A. . (2016). Analisi Hubungan Ekspor , Pertumbuhan Ekonomi , dan Kesempatan Kerja di Provinsi Bali : Pengujian Vector Auto Regression. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1408–1434.
- Purwaning Astuti, I., & Juniwati Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Rahayu, R. N. (2018). *KITE IKM bea cukai Sukses Tingkatkan Nilai Investasi*.
- Rinaldi, M. (2017). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 4(1), 2549–8355.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2005 tanggal 16-12-2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-11/BC/2006 tanggal 08-08-2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 36/PMK.04/2005 tanggal 26-05-2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana
- Safitriani, S., & Safitriani, S. (2014). Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investment Di Indonesia Pendahuluan Ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional cukup besar . Menurut Salvatore ( 2007 ), salah satu aktivitas perekonomian, 8(1), 93–116.
- Sholikhah, L. M. A. (2017). *Peran Sektor Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soeady, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ( Studi di Pemerintah Kota Batu ), 17(2), 88–96.
- Suharjon, Marwanti, S., & Irianto, H. (2017). Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia The Effects of Export , Import , and Investment on the Growth of the Indonesian Agricultural Sector, 35(1), 49–65.

- Sadono Sukirno. (1985) . *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bina Grafika
- Salvatore, Dominick. (2004). *International Economics.Eight Edition*.John Wiley & Sons, Inc.
- Salvatore, Dominick. (1997). *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima Jilid 1. Alih Bahasa Haris Munandar. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Samuelson, Paul A., and Nordhaus, William D. (1994).*Ekonomi*,Edisi ke-12 jilid2. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Soelistyo dan Nopirin.(1977). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Sy, R. A. (2007a). *Analisis Dampak Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Terhadap Volume Impor Bahan Baku Industri Garment & Tekstil di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sy, R. A. (2007b). *Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Volume Impor Bahan Baku Industri Garment dan Tekstil di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Tri U, D. D., & Darwanto. (2013). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), 1–13. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Tambunan, Tulus. (2001). *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P. (1997). *Economic Development*. Sixth Edition. NewYork.Longman
- Yolamalinda, H. Y. U. D. A. (2016). Analisis pemasaran dan kebijakan perdagangan internasional di sumatera barat. *Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), hal. 269-287.
- Yusuf, A. (2018). *Kontribusi Impor - Ekspor Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Perspektif EKonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian kuantitatifkualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

# LAMPIRAN



*Lampiran 1*

PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR  
(KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKPOR DALAM NEGERI  
(STUDI PADA KANTUR WILAYAH DIIREKTORAT JENDERAL BEA  
CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN)

---

Suci Rahmadani Ashar – 9030115036 – UIN Alauddin Makassar

081341315769 –[sucirahayuramadni11@gmail.com](mailto:sucirahayuramadni11@gmail.com)

**1. Apa yang melatarbelakangi sehingga dimunculkannya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ? apakah karena nilai ekspor yang minim ?**

Sebagian besar eksportir juga melakukan importasi sebagai bahan baku ataupun bahan penolong atas produk ekspornya. Kegiatan produksi barang ekspor tersebut membutuhkan barang/ bahan baku yang tidak ada di dalam negeri dengan kualitas yang dibutuhkan buyer dari luar.

Nilai ekspor senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap perlu didorong agar semakin meningkat, sehingga pertumbuhannya makin pesat. Fasilitas KITE ini juga merupakan salah satu terobosan baru dan pengembangan dari Fasilitas Kawasan Berikat. Dengan Fasilitas KITE, tidak perlu adanya penempatan pegawai di perusahaan namun kewajiban pada negara masih dapat dipastikan melalui mekanisme pemberian jaminan.

**2. Apa tujuan diadakannya fasilitas ini?**

DJBC senantiasa berperan aktif dalam rangka mendorong peningkatan kegiatan ekspor, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peningkatan insentif fiskal, penyederhanaan prosedur pelayanan dan otomasinya.



### **3. Dari tahun berapa KITE mulai dijalankan?**

Fasilitas KITE sudah sejak lama diberikan, yaitu sejak tahun 2011. Ditandai dengan pada saat dikeluarkannya peraturan tentang KITE yaitu KITE Pengembalian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.04/2011 sedangkan KITE Pembebasan PMK Nomor 254/PMK.04/2011.

Peraturan ini selalu mendapatkan revisi dalam rangka perbaikan pasal dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan jaman.

### **4. Bagaimana proses pemanfaatan fasilitas KITE ini? apakah dengan fasilitas ini, para pemilik perusahaan akan lebih mudah dalam mendapatkan bahan baku ?**

*Dengan pemanfaatan ini, selain kemudahan mendapatkan bahan baku juga perusahaan mendapatkan fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk dan PPN dan PPnBM tidak dipungut atau pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar.*

### **5. Apakah ada peningkatan nilai/ volume/kinerja ekspor dan impor bagi perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas ini?**

*Ada. Berdasarkan data yang ada, perusahaan eksportir yang mendapatkan fasilitas KITE secara umum selalu meningkat volume ekspornya.*

### **6. Bagaimana perbandingan ekspor sebelum dan sesudah adanya fasilitas KITE ini dalam ruang lingkup nasional?**

*Data untuk ruang lingkup nasional ada di Kantor Pusat DJBC, data yang ada hanya untuk ruang lingkup KITE di Kanwil sulbagsel.*

### **7. Apakah dengan adanya fasilitas ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan nasional / pertumbuhan ekonomi ?**

ya, karena dengan mendapatkan fasilitas ini, perusahaan dapat meningkatkan ekspor barangnya.

**8. Apakah di pulau sulawesi telah ada yang menggunakan fasilitas ini ?jika ada berapa perusahaan dan apa nama-nama perusahaan tersebut?**

*Ada, untuk Kanwil Sulawesi bagian selatan ada 4 Perusahaan yaitu PT. Mars Symbioscience Indonesian dan PT. Comextra Majora berlokasi di Sulawesi Selatan dan PT. Cahaya Modern Metal Industri dan PT. Bintang Smelter Indonesia yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.*

**9. Jika masih sedikit perusahaan yang menggunakan fasilitas ini, kira-kira apa yang menjadi penyebab perusahaan belum menggunakan fasilitas ini ?**

*Untuk wilayah sulawesi bagian selatan, penyebab perusahaan belum menggunakan fasilitas, antara lain :*

- 1. Barang/bahan baku yang digunakan oleh perusahaan masih menggunakan Barang/bahan baku lokal*
- 2. Kegiatan impor perusahaan belum ada*
- 3. Persyaratan pemenuhan fasilitas tersebut belum lengkap/belum memenuhi.*

**10. Dalam suatu negara tentu yang menopang pendapatan nasional salah satunya dari segi perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor. Namun dengan adanya fasilitas KITE ini memancing pelaku usaha untuk terus menerus melakukan impor ?baguskah impor ? bagaimana pandangan bea cukai terhadap kondisi tersebut ?**

*Kegiatan impor biasanya dilakukan karena negara tersebut tidak bisa menyediakan barang atau bahan baku yang dibutuhkan masyarakat atau tidak mencukupi atau tidak dapat mengimbangi permintaan konsumsi nasional. Hal*

inilah yang menyebabkan mengapa suatu perusahaan memutuskan untuk mengimpor barang atau jasa dari negara lain, yaitu untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan penduduk negara itu dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah atau efisien. Mungkin juga bahan baku / bahan penolong yang ada di dalam negeri tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh buyer atau pembeli yang ada diluar. Dengan bea cukai memfasilitasi perusahaan dengan KITE akhirnya malah mendorong Perusahaan untuk meningkatkan ekspornya.

#### **11. Bagaimana nasib bahan baku dalam negeri ketika adanya fasilitas KITE yang terus mendorong impor ?**

Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas fiskal yang diberikan DJBC untuk **mendorong ekspor**. Jadi salah bahwa Fasilitas KITE untuk mendorong impor, namun diberikan fasilitas fiskal jika ada komponen bahan baku/ bahan penolong yang berasal dari impor, berupa pembebasan / pengembalian Bea masuk dan/ atau Cukai.

Bahan baku lokal tetap diperlukan oleh perusahaan eksportir. Karena komponen lokal masih merupakan komponen utama dari produk ekspor

#### **12. Apa dampak sejak adanya fasilitas KITE ini bagi perekonomian nasional ?**

Dapat mendorong pertumbuhan ekspor.

#### **13. Profil bea cukai**

Profil lengkapnya bisa dilihat di [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan beralama di Jalan Satando No. 94 Kel. Malimongan Kec. Wajo Kota Makassar, Berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kanwol DJBC Sulbagsel mengawasi 4 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yaitu :

1. *KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar) berlokasi di Kota Makassar - Sulsel*
2. *KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare berlokasi di Kota Parepare - Sulsel*
3. *KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berlokasi di Malili-Sulsel*
4. *KPPBC Tipe Madya Pabean C Makassar berlokasi di Kota Kendari – Sultra*



*Lampiran II*

PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR  
(KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI

---

Suci Rahmadani Ashar – 9030115036 – UIN Alauddin Makassar  
081341315769 –[sucirahayuramadni11@gmail.com](mailto:sucirahayuramadni11@gmail.com)

1. Latar belakang perusahaan PT. Mars Symbioscience Indonesia  
*PT. Mars berdiri sejak 1996 di makassar, berawal sebagai perusahaan dalam penelitian biji kakao asli sulawesi sehingga mnejadi salah satu eksportir kakao terbesar di indonesia.*
2. Perusahaan ini bergerak dibidang apa ?  
*Produksi Kakao*
3. Apakah perusahaan ini menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ?  
*Sudah*
4. Jika ia, perusahaan menggunakan jenis fasilitas apa ? pengembalian atau pembebasan ?  
*Fasilitas KITE Pembebasan*
5. Sejak kapan perusahaan ini menggunakan fasilitas KITE & Mengapa memutuskan untuk menggunakan fasilitas ini ?  
*2014*
6. Apakah perusahaan ini telah merasakan manfaat dari adanya fasilitas tersebut ? jika ia, manfaat seperti apa yang dirasakan ?  
*Iya,Manfaat yang kita dapatkan adalah dengan dibebaskannya pajak impor bea masuk dan PPn maka kita bisa melakukan cost saving dan*

*mengalokasikan kedalam hal hal yang menunjang bisnis PT. Masr symbioscience Indonesia.*

7. Bagaimana perbandingan ekspor impor perusahaan sebelum dan setelah menggunakan fasilitas KITE ?

*Sebelum KITE = 1996 – 2014 Ekspor  $\pm$  2000 ton Kakao olahan / tahun*

*Setelah KITE = 2014 – 2019 Ekspor meningkat  $\pm$  3500 Kakao olahan / tahun*

8. Berapa persentasi naiknya ekspor tiap tahunnya setelah menggunakan fasilitas KITE ?

*Setiap tahunnya meningkat  $\pm$  20-40%*

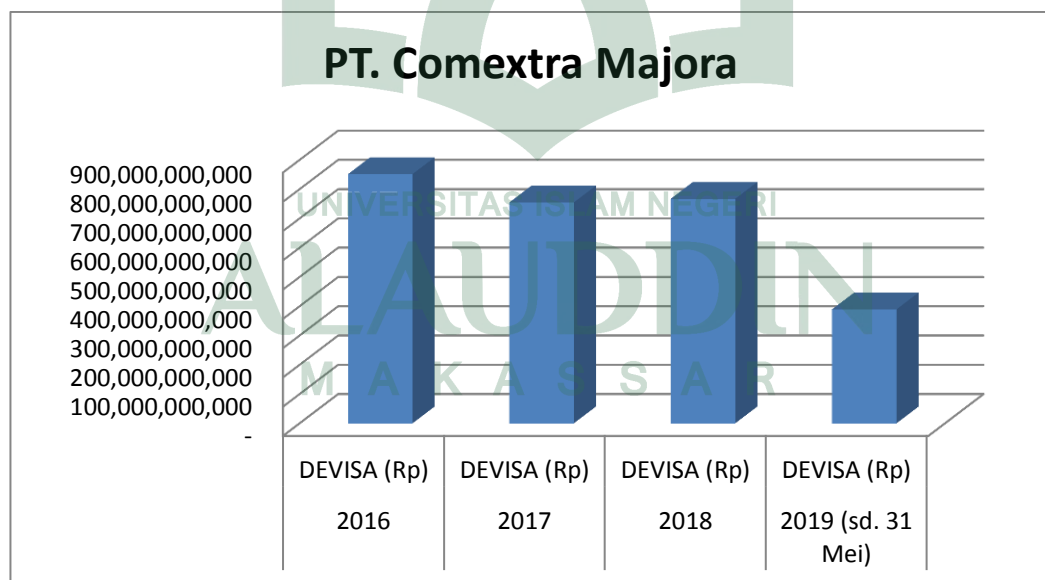
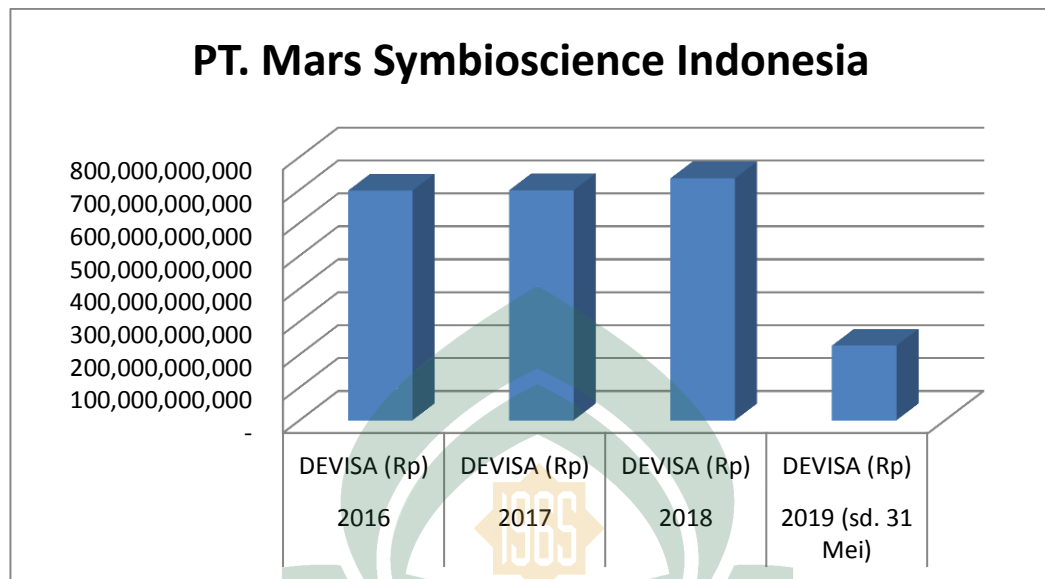
9. Apakah ada peningkatan output/jumlah produksi setelah menggunakan fasilitas KITE ini ?

*Ada*

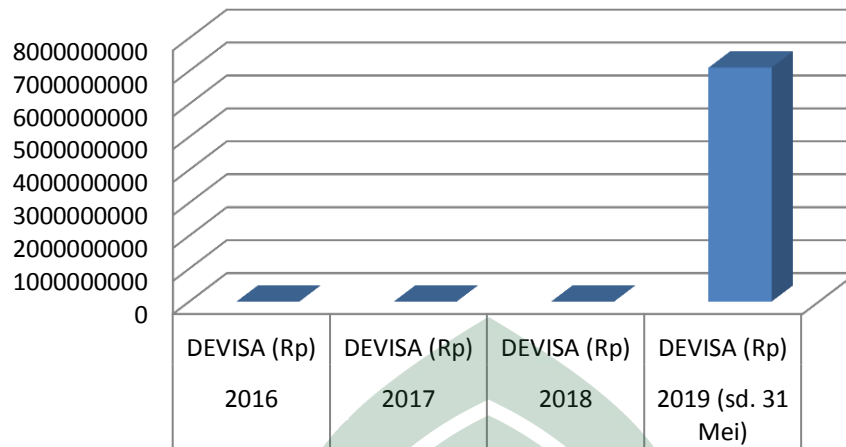
10. Bagaimana dengan pengenaan harga produk perusahaan, apakah fasilitas ini berpengaruh terhadap pengenaan harga atau tidak ?

*Berpengaruh, karena cost saving pada BM dan PPn maka dalam proses barang mentah menjadi finish goods memiliki kenaikan 60% value.*

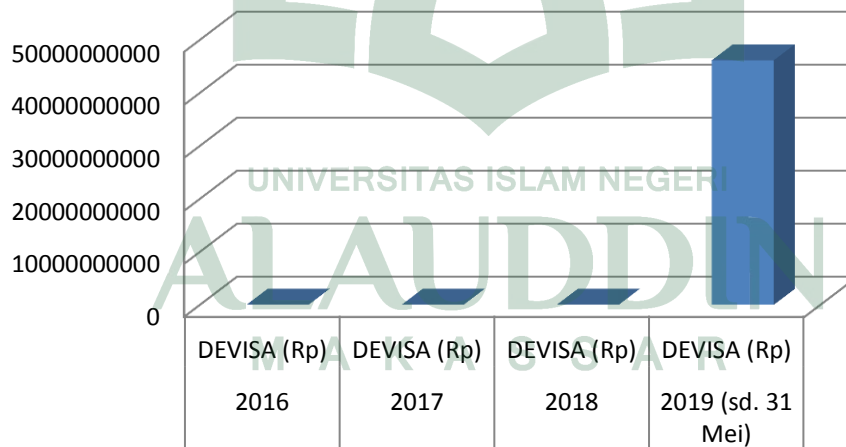
### DATA REALISASI EKSPOR FASILITAS



### PT. Cahaya Modern Metal Industri

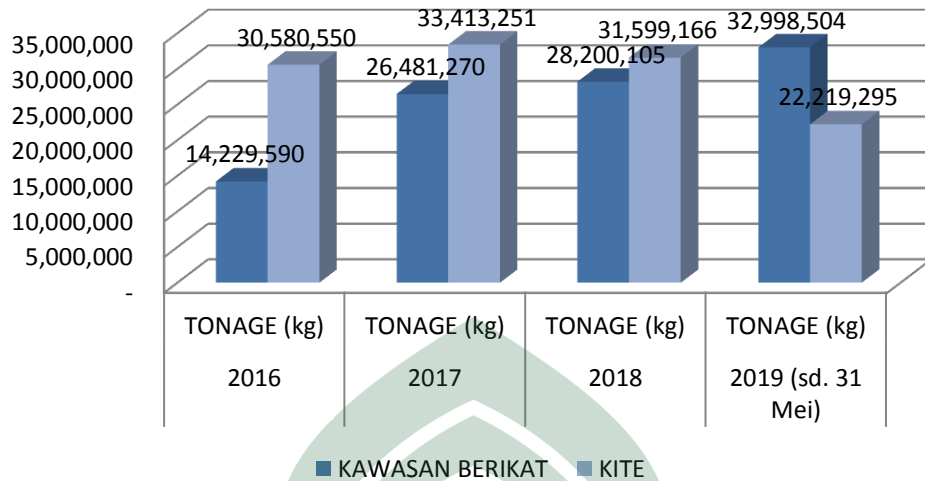


### PT. Bintang Smelter Indonesia

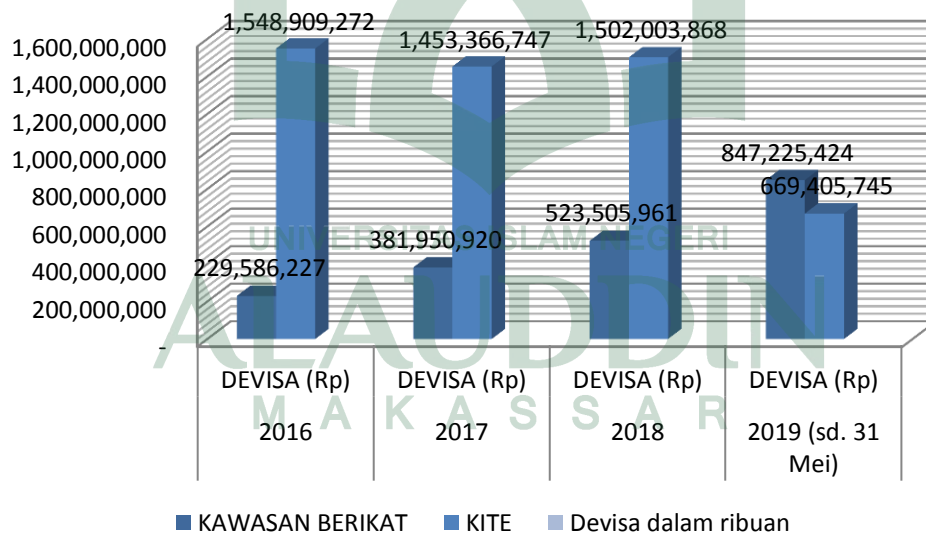




### Tonage Ekspor Perusahaan Fasilitas



### Devisa Ekspor Perusahaan Fasilitas





UNIVERSITAS SULAWESI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR









### DAFTAR NAMA – NAMA INFORMAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pemanfaatan Fasilitas KITE untuk Meningkatkan Ekspor dalam Negeri, penulis telah mewawancarai 5 orang secara mendalam, berikut nama informan

1. **Bpk. Tommy Prasetyo Utomo - Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas IIDJBC Sulsel**
2. **Bpk Yusri Harfiddin – Pelaksana Pemeriksa pada seksi perijinan dan fasilitas II DJBC Sulsel**
3. **Bpk. Muh Yasir Usman – Pelaksana pemeriksa pada seksi perijinan kantwil DJBC Sulsel**
4. **Bpk. Randy Perkasa Putra – Pelaksana pemeriksa DJBC Balikpapan**
5. **Bpk. Makhfud Fibrianto – Exim Coordinator PT. Mars symbioscience Indonesia**



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama SUCI RAHMADANI ASHAR atau biasa dipanggil Suci. Penulis dilahirkan di Sengkang pada tanggal 11 Desember 1997, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ashar Hamnar dan Ibu Yuliana Agus. Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2003 di SDN 58 Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Palu dan diselesaikan pada tahun 2015 di SMAN 2 Bulukumba. Penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi pada awal september 2015 dan telah tercatat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan program studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R